



# Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 48 Volume 12 Desember 2016

**Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan Disosialisasikan**

**Wapres Buka Seminar dan Pameran HLN ke-71**

**Menteri Jonan: Yang Penting Pemerataan Listrik**



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



*Nilai-nilai  
Kementerian ESDM*

**Jujur**  
**Profesional**  
**Melayani**  
**Inovatif**  
**Berarti**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)



## Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 44 Volume XII|

DESEMBER 2016

### SUSUNAN REDAKSI

#### Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Ketenagalistrikan

#### Redaktur

Totoh Abdul Fatah  
Wiwid Mulyadi  
Heru Setiawan  
Ear Marison  
Hagni Surendro  
Sudarti  
Jackson Frans  
Fathorrahman  
Hari Dwi Wijayanto  
Pandu Satria Jati B  
Anggita Miftah Hairani  
David F Silalahi  
Ahmad Amiruddin  
Miftah Haris  
Novan Akhiryanto  
Dina Andriani  
Hening Surya Bayu A.  
Fanny Ristantono  
M. Tomas Triananta

#### Penyunting/ Editor

Hutami Hikma Asih  
Ernawaty  
Sahri Mahmud  
Ridwan Budi Santoso

#### Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono  
Agus Supriyadi  
Ajat Munajat  
Agah Muhammad Abduh  
Adar

#### Sekretariat

Emi Tursilah  
Irman Suryana  
Novi Pravitasari  
Lutfhi  
Dewi Agustini

#### Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,  
Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

# Dari Redaksi

Pembaca yang budiman,

Mulai awal tahun 2017, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan daya 900 VA. Untuk menyosialisasikan hal tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengadakan coffee morning pada November 2016. Diharapkan acara itu dapat memberikan pemahaman pada para pemangku kepentingan tentang pentingnya menerapkan kebijakan subsidi yang menysasar pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain tema kebijakan subsidi listrik yang menjadi Tajuk Utama buletin edisi Desember ini, kami juga mengulas meriahnya Hari Listrik Nasional ke-71 dalam Liputan Khusus. Dalam Warta Kita, kami membahas arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait sektor ketenagalistrikan, laporan kunjungan kerja Dirjen Ketenagalistrikan di Myanmar dan Prancis, serta berita lainnya.

Buletin kali ini menjadi edisi penutup di tahun 2016. Semoga tahun ini berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sampai bertemu di tahun 2017!

*Salam Redaksi*

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Syarat Teknis :

- 1.Font penulisan naskah menggunakan Arial
- 2.Ukuran font yang digunakan 12
- 3.Jarak spasi penulisan 1,5
- 4.Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

#### Syarat Umum:

- 1.Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
- 2.Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
- 3.Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
- 4.Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
- 5.Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
- 6.Naskah dikirim melalui email ke [humas.djk@gmail.com](mailto:humas.djk@gmail.com)
- 7.Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan *caption*
- 8.Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
- 9.Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

# DAFTAR ISI

**Hari Listrik Nasional**

**SEMINAR & PAMERAN HLN KE-71**

**Mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan: Kecukupan, Kompetitif, Berkelanjutan dan Merata untuk Menuju "Indonesia Terang"**

28 - 30 September 2016  
Jakarta Convention Center

**12 Meriahnya Pameran Hari Listrik Nasional ke-71**

## Dari Redaksi

## Tajuk Utama

- 6 Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Daya 900 VA
- 8 PLN Jelaskan Proses Pemilahan Pelanggan 900 VA yang Layak Dapatkan Subsidi

## Liputan Khusus

- 10 Wapres Buka Seminar dan Pameran HLN ke-71
- 14 Kebijakan Pemerintah Atasi Kendala Pembebasan Lahan
- 15 Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan
- 16 Penutupan Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional ke-71
- 17 Menteri Jonan: Yang Penting Pemerataan Listrik di Indonesia

## Warta Kita

- 19 Presiden Joko Widodo Kunjungi Booth Kementerian ESDM dalam IIICE 2016
- 20 Peluang Investasi Ketenagalistrikan Masih Besar
- 22 Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan Disosialisasikan
- 23 Pemerintah Harapkan Sumbangan Pemikiran Kontraktor Ketenagalistrikan
- 24 Kilas Balik Perumusan Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan
- 26 Laporan dari Myanmar: Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri The 34th AMEM
- 29 Pemerintah Dorong *Clean Coal Technology* untuk PLTU Batubara
- 30 Menteri ESDM Tengah Siapkan Aturan untuk Melistriki 2.510 Desa
- 37 Lulusan SMK Ketenagalistrikan Diharap Menjadi Tenaga Terampil Level Satu

- 39 Pimpinan Ditjen Gatrik dan KPK Urai Persoalan-Persoalan di Bidang Ketenagalistrikan
- 40 Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71
- 42 IBEA 2016 Dorong Peningkatan *Local Content*
- 44 Laporan dari Paris: Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Konferensi Internasional Reformasi Subsidi Energi Fosil
- 45 Melalui Inovasi, PT PLN Dituntut Berikan Layanan Maksimal
- 46 Ignasius Jonan Tegaskan Perubahan Harus Dimulai dari Diri Sendiri
- 48 Pembangkit Listrik Harus Mengedepankan Teknologi Ramah Lingkungan
- 50 Dirjen Ketenagalistrikan Pantau Kesiapan Evakuasi Daya PLTP Sarulla
- 52 Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Penandatanganan Kontrak Pembangunan PLTU Bengkulu
- 54 Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi PLTU Tenayan dan PD Tuah Sekata di Riau

### Galeri

- 32 Peringati HLN Ke-71, Masyarakat Ketenagalistrikan Gelar Fun Bike di Cinere

### Resensi

- 36 - Cara Pintar Berbicara Cerdas di Depan Publik
- Transmisi Daya Listrik

### Tips

- 56 Menghindari Mengantuk Setelah Jam Makan Siang

### Pojok Peraturan

- 58 Daftar Legislasi & Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK Januari - Desember 2016



18

**Arahan Menteri ESDM Terkait Subsektor Ketenagalistrikan**



21

**Peluncuran Buku "Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga"**



34

**25 PPNS Ketenagalistrikan Dilantik**



49

**Filosofi Baru Penyediaan Energi Listrik**



*Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dalam acara coffee morning (18/11) menyampaikan pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran dari golongan masyarakat mampu 900 VA akan dipindahkan untuk membangun infrastruktur transmisi listrik.*

# Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran Daya 900 VA

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar acara *coffee morning* dalam rangka sosialisasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran di Jakarta (18/11). Dalam acara tersebut dibahas mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Pada acara tersebut tampak hadir Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel, dan Direktur Eksekutif Bank Indonesia Juda Agung.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman. Ia mengatakan bahwa dari data tahun 2016, rasio elektrifikasi di Indonesia 89.5%. Artinya masih ada 10.5% masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik.

"Kalau dilihat dari data, kira-kira tujuh juta kepala keluarga belum menikmati listrik, kalau dikalikan empat orang dalam satu keluarga, jadi hampir ada 28 juta orang belum berlistrik," ujar Jarman.

Jarman menuturkan bahwa usaha-usaha perlu dilakukan untuk memberikan listrik secara merata untuk seluruh masyarakat dan mencapai target rasio elektrifikasi 97% tahun 2019. Pembangunan transmisi infrastruktur listrik ke seluruh daerah pelosok dan pulau-pulau kecil di Indonesia tentunya membutuhkan dana yang besar. Dana yang diperlukan untuk membangun transmisi ini menurut Jarman bisa diperoleh dari penghematan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.

Pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran dari golongan masyarakat mampu 900 VA akan dipindahkan untuk membangun infrastruktur transmisi bagi daerah yang

## Tajuk Utama



Coffee morning dihadiri oleh Direktur Eksekutif BI Juda Agung (kiri) dan Dirut PT PLN (persero) Sofyan Basir (tengah)



Satya Zulfanitra menyampaikan penyesuaian kenaikan tarif dilakukan bertahap agar masyarakat tidak terlalu terbebani.

masyarakatnya saat ini belum mendapatkan listrik sehingga diharapkan nantinya semua masyarakat bisa menikmati listrik.

"Diharapkan kemudian kepada masyarakat yang mampu yang dicabut subsidi, mohon pengertiannya bahwa ini semata-mata untuk menolong saudara-saudara kita yang saat ini belum menikmati listrik," Jarman melanjutkan.

Dasar hukum penerapan pemberian subsidi listrik dari pemerintah kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah beserta pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Selama ini pemerintah menentukan tarif listrik dan mekanisme pemberian subsidi listrik melalui persetujuan DPR. Menteri ESDM telah mengadakan rapat kerja dengan komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2016 untuk membahas perihal subsidi listrik, dan dari hasil rapat tersebut disetujui bahwa untuk listrik 900 VA golongan rumah tangga mampu tidak lagi diberikan subsidi.

"Pencabutan subsidi kepada golongan rumah tangga 900 VA tentunya harus didukung dengan data yang akurat. Data ini adalah data yang diberikan oleh PLN, TNP2K, dan Kemensos," ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra, dalam kesempatan yang sama. PLN dan Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K) tahun lalu sudah melakukan pendataan terhadap pelanggan PLN. Pelanggan PLN tersebut dicacah dan disisir lagi oleh PLN

untuk dipilih mana yang benar-benar membutuhkan subsidi dan mana yang sudah tidak membutuhkan subsidi. Data menunjukkan di Indonesia ada sebanyak 23 juta pelanggan rumah tangga 900 VA. Dari seluruh pelanggan rumah tangga 900 VA tersebut sebagiannya akan melakukan migrasi dari listrik subsidi ke golongan listrik yang nonsubsidi.

Satya menjelaskan implementasi penyesuaian kenaikan tarif listrik nonsubsidi yang akan dilakukan mulai tahun depan. "Mungkin mereka perbulannya membayar Rp74.000 (Desember 2016), jadi kita naikkan bertahap misalnya bulan Januari-Februari membayar listrik Rp98.000, dan nanti Rp130.000 (Maret-April), dan bulan Mei Juni akan sekitar Rp180.000, nah kenaikannya itu akan kita laksanakan bertahap supaya tidak langsung naik dari Rp74.000 ke Rp180.000, tinggi sekali," pungkas Satya. Skenario kenaikan secara bertahap ini dibuat agar masyarakat bisa mempertahankan nilai keekonomiannya.

Untuk ke depannya apabila ada masyarakat yang merasa dirinya kurang mampu dan berhak mendapatkan subsidi listrik, yang bersangkutan bisa melaporkan dengan mengisi formulir melalui kantor desa dan kelurahan setempat untuk selanjutnya diteruskan ke kantor kecamatan dan kabupaten. Oleh kecamatan dan kabupaten, laporan tersebut diteruskan ke posko pusat. Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K dan PLN akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap pelaporan tersebut. Jadi tim inilah yang nantinya akan menentukan mana yang bisa masuk ke dalam golongan subsidi dan nonsubsidi. (UH)

# PLN Jelaskan Proses Pemilahan Pelanggan 900 VA yang Layak Dapatkan Subsidi

*Kepala Divisi Niaga Benny Marbun memberikan paparan dalam coffee morning terkait subsidi tepat sasaran pelanggan 900 VA di Jakarta (18/11).*



Mulai awal tahun 2017, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan daya 900 VA. PLN melakukan proses pemilahan pelanggan 900 VA untuk menentukan pelanggan yang layak mendapatkan subsidi. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun dalam *coffee morning* di Ditjen Ketenagalistrikan (18/11) menyampaikan proses pemilahan tersebut.

"Pada Desember 2015, PLN menerima Data Terpadu dari TNP2K sebanyak 4.152.714 rumah tangga daya 900 VA," ujar Benny. Data Terpadu yang dimaksud adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang dikelola oleh kelompok kerja dengan anggota dari Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"PLN kemudian melakukan pemilahan Data Terpadu TNP2K sesuai dengan wilayah unit kerja PLN mulai Januari 2016," Benny melanjutkan. Data Terpadu dipilah dan disitribusikan berdasarkan wilayah kerja unit PLN, per provinsi hingga per desa/kelurahan. Setelah itu, PLN melakukan survey langsung pemadanan data ke alamat yang terdaftar di Data Terpadu TNP2K.

"PLN mencocokkan data TNP2K dengan data PLN. Mereka yang dapat subsidi harus dicek. Tidak bisa cek di atas meja, di komputer. Mau tidak mau harus datang ke lapangan," ungkap Benny. Dalam proses yang berlangsung selama tiga bulan dari Januari hingga Maret 2016 ini, PLN melakukan survey ke alamat sesuai Data Terpadu dan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Terpadu dengan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk rumah tangga tersebut. PLN kemudian mencatat ID pelanggan PLN rumah tangga tersebut.

## Tajuk Utama



*Peserta coffee morning menyampaikan pandangannya tentang kebijakan subsidi untuk pelanggan 900 VA.*

Dari hasil pencocokan 4.152.714 rumah tangga, yang masuk tanggung jawab PLN ada 4.139.383 sementara sisanya masuk ke anak perusahaan PLN di Batam dan Tarakan. Benny menjelaskan, "Dari jumlah 4.139.383 yang masuk tanggung jawab PLN, sebanyak 192.521 tidak ditemukan dan yang teridentifikasi 3.942.862 rumah tangga. Maksudnya tidak ditemukan itu terkadang alamat ditemukan, namun orangnya tidak ada atau tidak bisa menunjukkan NIK. Kalau yang teridentifikasi maksudnya bisa kami datangi dan ketemu dengan orangnya."

Benny menyampaikan, dari jumlah yang teridentifikasi tersebut, hanya 2.895.073 rumah tangga dengan daya 900 VA yang sesuai kriteria untuk mendapatkan subsidi. Sementara itu, ada 1.047.789 rumah tangga yang di luar 900 VA. Mereka ini ada yang menggunakan daya 450 VA dan daya di atas 900 VA. Benny tidak memungkiri adanya masyarakat tidak mampu yang menggunakan daya di atas 900 VA. "Mereka biasanya menempati rumah milik tuannya yang tinggal di kota," Benny mencontohkan.

Ia menegaskan bahwa rumah tangga 450 VA otomatis bersubsidi, namun rumah tangga tidak mampu yang menggunakan daya di atas 900 VA tidak mendapat subsidi. "Kalau mereka tetap mau bersubsidi, boleh kami berikan dengan syarat turun daya ke 900 VA atau 450 VA," ungkap Benny.

Benny kemudian menjelaskan mekanisme pengaduan penerapan subsidi listrik tepat sasaran. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan pengaduan melalui desa atau kelurahan. Mengantisipasi hal tersebut,

dibentuk Posko Pengaduan yang melibatkan jajaran aparaturnya pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan dan desa untuk menampung pengaduan. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, dibentuk Tim Ad-hoc lintas instansi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PLN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel menyampaikan bahwa kelompok masyarakat yang mampu telah menikmati subsidi listrik lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.



*Ruddy Gobel dari TNP2K menyatakan kebijakan subsidi harus adil untuk masyarakat.*

"Ini salah satu alasan kenapa harus me-reform (kebijakan subsidi) ini. Selain memberikan ruang kepada fiskal kita supaya kita bisa membangun infrastruktur listrik dan lainnya lebih baik, tapi yang lebih penting adalah keadilan. Keadilan buat masyarakat; bahwa masyarakat miskin perlu mendapat perhatian lebih," ujar Ruddy.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia Juda Agung yang juga menyampaikan paparan dalam *coffee morning* memperkirakan dampak kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap inflasi 2017 sebesar 0,95%. (AMH)

# Wapres Buka Seminar dan Pameran HLN Ke-71



Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-71 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di JCC (28/9).



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjelaskan progres Program 35.000 MW kepada Wapres Jusuf Kalla.

## Liputan Khusus



*Booth Kementerian ESDM ikut meramaikan Pameran HLN ke-71.*

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-71 di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Rabu (28/9). Acara seminar dan pameran yang akan dilaksanakan hingga Jumat (30/9) tersebut diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional yang akan diperingati pada 27 Oktober 2016 mendatang. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla melihat bahwa listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang keempat. Untuk itu membangun infrastruktur kelistrikan menurutnya bukan semata-mata hanya masalah peningkatkan prosentase elektrifikasi semata namun berkaitan dengan keberlanjutan sumber energinya. Karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, maka para pihak yang memenuhi kebutuhan listrik harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu penyedia kebutuhan listrik harus dapat mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan yang terdiri dari kecukupan, kompetitif, berkelanjutan dan merata. "Karena listrik sudah menjadi pendukung kehidupan dasar maka tentu juga menjadi prioritas dasar maka kita harus menjaga jumlahnya, kualitasnya, dan juga kesinambungannya," jelasnya.

Jusuf Kalla kembali mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik sehari-hari. Hal itu perlu dilakukan untuk menekan angka subsidi energi yang diberikan negara. JK berharap tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dimana pada tahun 2014 subsidi listrik mencapai Rp 100 triliun dari total Rp 390 triliun subsidi yang didistribusi negara. "Padahal dengan Rp 100 triliun kita bisa bangun 10

ribu megawatt listrik. Jadi ongkos keterlambatan adalah larinya ke subsidi," kata Wapres.

Hemat energi menurutnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana, yaitu mematikan peralatan listrik jika keluar ruangan serta mengenakan pakaian yang tidak membuat gerah di suhu tropis. Menurutnya, pakaian batik merupakan pakaian yang tepat untuk dikenakan masyarakat Indonesia, sebab dibandingkan mengenakan jas di acara-acara resmi, suhu udara tidak perlu dingin namun bisa sesuai suhu ruangan standard yaitu 25 derajat celsius.

Usai membuka acara, Jusuf Kalla mengunjungi berbagai stan dari peserta pameran salah satunya *booth* Kementerian ESDM yang diikuti oleh Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Badan Litbang ESDM, serta Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM. Dalam kunjungannya tersebut, Jusuf Kalla mendapat penjelasan dari Dirjen Ketenagalistrikan terkait progres pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program prioritas nasional tersebut.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Supangkat Iwan Santoso, acara seminar dan pameran ini diikuti oleh pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari perusahaan pengembang ketenagalistrikan (IPP), industri komponen ketenagalistrikan, kontraktor, pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi di bidang ketenagalistrikan. (PSJ)



# Liputan Khusus



Direktur Teknik dan Lingkungan Munir Ahmad membacakan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan. Dirjen berharap MKI bisa menjadi mitra pemerintah dalam mencari solusi permasalahan di sektor ketenagalistrikan.

dan pengunjung pameran tahun ini sangat antusias, terbukti dengan tercatatnya 1.300 pengunjung dalam tiga hari pelaksanaan acara. Noesita mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang disebutnya sangat terasa.

“Terima kasih kepada pemerintah yang turun langsung, dukungan dan terobosan di sektor ketenagalistrikan sangat terasa,” paparnya.

Ketua Umum MKI Supangkat Iwan Santoso juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada panitia dan pemerintah sehingga acara tahunan MKI ini dapat berjalan dengan lancar. Tema yang diangkat dalam seminar dan pameran tahun ini yaitu ‘Mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan, Kecukupan, Kompetitif, Berkelanjutan,

dan Merata untuk Menuju Indonesia Terang’ diharapkan dapat dinyatakan dalam pekerjaan dan tugas sehari-hari. Iwan menyampaikan bahwa tahun depan pelaksanaan seminar dan pameran HLN ke-72 akan diadakan kembali di JCC tanggal 27 s.d. 29 September 2017.

Kemeriahan pameran HLN ke-71 tahun 2016 juga sangat terasa di stan Kementerian ESDM yang diikuti oleh empat unit Eselon I, yaitu Ditjen ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Badan Litbang ESDM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM. Dalam booth yang juga dikunjungi oleh Wapres Jusuf Kalla tersebut, pengunjung mendapatkan berbagai informasi terkait kebijakan dan aturan ketenagalistrikan baik dari program, pembinaan usaha, hingga keteknikan.

Layanan informasi dan konsultasi online KIOSK Ditjen Ketenagalistrikan ditampilkan sebagai menu utama sehingga pengunjung langsung mendapat informasi terkait kemajuan 35.000 MW, persyaratan dan mekanisme investasi, serta berbagai inovasi dari Ditjen Ketenagalistrikan. Ditjen EBTKE, Badan Litbang dan BPSDM Kementerian ESDM juga menampilkan berbagai inovasi terkait sektor ketenagalistrikan di unit masing-masing. (PSJ)

# Kebijakan Pemerintah Atasi Kendala Pembebasan Lahan



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman (kanan) menjadi narasumber dalam Seminar HLN ke-71 di Jakarta (28/9).

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mengungkapkan setidaknya ada empat kendala dalam percepatan pembangunan ketenagalistrikan, yakni terkait pembebasan lahan, perizinan, perencanaan dan kontraktual.

“Banyak tanah yang belum dibebaskan karena harga tanah jauh di atas harga standar PLN atau appraisal,” Jarman menjelaskan dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Jakarta, Rabu (28/9). Tumpang tindih kepemilikan lahan juga menjadi tantangan tersendiri di lapangan.

Perizinan yang memakan waktu lama dari instansi terkait juga menjadi perhatian. Proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik membutuhkan perizinan lintas instansi, seperti izin prinsip dan izin lokasi dari pemerintah daerah, izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, izin *jetty* dari Kementerian Perhubungan, dan Izin Pemanfaatan Air Permukaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jarman menyampaikan pertemuan dengan instansi terkait terus dilakukan untuk mengurai hambatan.

“Untuk perizinan yang berhubungan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sudah kami coba untuk melakukan pertemuan-pertemuan agar bisa diselesaikan,” tutur Jarman.

Jarman melanjutkan perencanaan yang kurang baik juga menjadi kendala. Kurangnya perencanaan ini tercermin pada *feasibility study* yang kurang akurat, kualitas detail desain yang kurang baik, hingga kurangnya konsultan perencana yang terakreditasi. Selain itu, kendala kontraktual yang terjadi diakibatkan antara lain oleh performa kontraktor yang kurang baik.

Di antara semua kendala tersebut, pembebasan lahan diidentifikasi sebagai kendala terbesar dalam proyek pembangkit pada Program 35.000 MW. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi beberapa kebijakan terkait lahan untuk proyek tenaga listrik. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU Nomor 30/2009, (2) Perpres Nomor 4/2016, (3) Permen ESDM Nomor 18/2015, dan (4) Permen ESDM Nomor 38/2013.

Jarman menambahkan, saat ini tengah disusun draft Permen ESDM tentang penyelesaian teknis terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan hutan dalam rangka percepatan infrastruktur ketenagalistrikan. Kebijakan-kebijakan terkait lahan untuk proyek ketenagalistrikan tersebut diharapkan dapat menguraikan kendala yang terjadi di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman juga menyampaikan progres Program 35.000 MW. “Untuk Program 35.000 MW, yang sudah kontrak baru separuhnya,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa per September 2016, yang sudah kontrak/*power purchase agreement* (PPA) mencapai 19.120 MW dan yang belum kontrak sebesar 16.507 MW dari total kapasitas 35.627 MW. Sementara itu, dalam Proyek 7.000 MW dengan total kapasitas 7.513 MW, sebanyak 3.906 MW sudah *commercial operation date* (COD) sementara 3.607 MW lainnya masih pada tahap konstruksi. (AMH)

# Pemerintah Dorong Swasta Kembangkan Listrik Perdesaan



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Jakarta (29/9).

Masih ada 2.519 desa yang belum terlistriki di Indonesia. Untuk menerangi ribuan desa tersebut pada tahun 2019 sesuai target pemerintah, diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dari swasta. Oleh karena itu, pemerintah mendorong swasta ikut berpartisipasi untuk kembangkan listrik perdesaan (lides). Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul dalam seminar Hari Listrik Nasional ke-71 di JCC Jakarta (29/9).

Untuk menarik minat swasta agar berinvestasi kembangkan lides, Alihuddin menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan kemudahan pada swasta salah satunya dengan

pemberian subsidi. "Ini masih konsep yang akan kami kembangkan," ujarnya.

Alihuddin menyampaikan masih ada empat provinsi yang rasio elektrifikasinya di bawah 70%. Keempat provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk Papua bahkan rasio elektrifikasinya baru 45,93%.

"Perlu dukungan dari semua pihak bagaimana ini bisa kita selesaikan, mereka juga saudara kita. Saudara-saudara di ujung Indonesia itu harus kita pikirkan listriknya," tutur Alihuddin. Ia menekankan sinergi menjadi hal yang penting, "Kalau berpikir sendiri-sendiri, ini tidak akan jadi. Seperti kata Pak Presiden, kita harus berpikir negara."

Pembangkit untuk lides disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan; bisa berupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro, minihidro, bayu (angin), matahari, dan lainnya. Lebih lanjut Alihuddin mengungkapkan bahwa total kapasitas terpasang di tahun 2015 adalah sebesar 55.528 MW yang berasal dari PT PLN (persero), *independent power producer* (IPP), dan *private power utility* (PPU). Ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden untuk percepatan pembangunan ketenagalistrikan merupakan kebutuhan.

"Kita harus pikirkan yang mana yang perlu kita prioritaskan sehingga rencana dilakukan dengan baik. Di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - red) harus tercermin listrik perdesaan dalam rangka mengembangkan 35.000 MW," Alihuddin menyampaikan.

PLN tidak lagi menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk lides di tahun 2017 mendatang. Meskipun demikian, Alihuddin mengingatkan bahwa PLN harus menjaga janjinya untuk menerangi Indonesia sesuai Visi 75-100 PLN, yakni rasio elektrifikasi 100% pada saat ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. (AMH)

# Penutupan Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional ke-71

*Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad (kiri) menyerahkan penghargaan untuk booth terbaik dalam pameran HLN ke-71.*



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Jumat (30/9) menutup secara resmi acara Seminar dan pameran Hari Listrik Nasional (HLN) ke-71 di *Jakarta Convention Center (JCC)*.

Acara seminar dan pameran yang diselenggarakan 3 hari mulai dari 28 hingga 30 Oktober 2016 ini merupakan awal dari rangkaian peringatan HLN. Selain pameran dan seminar, nantinya juga akan diselenggarakan kegiatan lain seperti olahraga, sepeda santai, dan *coffee morning*.

Saat menutup pameran HLN 2016, Munir membacakan sambutan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Jarman. "Kami berharap peringatan Hari Listrik Nasional ini menjadi momentum semua masyarakat ketenagalistrikan untuk lebih semangat bekerja untuk meningkatkan akses listrik kepada masyarakat," ujar Munir.

Melalui acara ini, Munir mengharapkan para pemangku kepentingan dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan ketenagalistrikan. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memperluas jaringan sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dalam program pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia.

Munir juga meminta kepada Masyarakat

Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk terus melakukan upaya yang positif sehingga tercipta sinergi yang lebih baik demi tercukupinya kebutuhan tenaga listrik Indonesia.

Sebagai penutup, Munir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan seminar dan pameran ini.

"Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil 'alamin, seminar dan pameran Hari Listrik ke-71 dengan ini secara resmi saya tutup," tutup Munir yang disambut tepuk tangan meriah dari para pengunjung. (UH)

# Menteri Jonan: Yang Penting Pemerataan Listrik di Indonesia



Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan pentingnya pemerataan listrik di Indonesia dalam coffee morning di Jakarta (27/10).

Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional Ke-71, pada hari Kamis (27/10) diselenggarakan *coffee morning* bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian acara peringatan Hari Listrik Nasional. Acara dihadiri oleh ketua beserta segenap anggota Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero serta para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM.

Pada acara tersebut Jonan menyampaikan bahwa yang paling penting dari listrik adalah pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Listrik untuk fasilitas umum seperti penerangan jalan dan lainnya juga harus dipenuhi,

bukan hanya rumah penduduk yang dialiri listrik. Di daerah-daerah masih ada yang hampir semua rumahnya teraliri listrik akan tetapi saat malam hari jalanannya gelap gulita. Jonan berharap nantinya sudah tidak ada lagi kondisi seperti ini. Bagi Jonan, rasio elektrifikasi dianggap bukan yang paling penting, akan tetapi pemerataannya.

Untuk daerah-daerah timur Indonesia seperti Papua, Jonan menyarankan untuk pembangkit dengan sistem *off grid*.

"Pemerintah tidak melihat dari bisnis akan tetapi melihat geografi, untuk wilayah timur atau provinsi-provinsi yang sifatnya kepulauan menurut saya sebaiknya *off grid* apakah itu hydro, surya, dan lain-lain agar tidak *costly*," tegas Jonan.

Di daerah Indonesia timur yang terdiri dari kepulauan dengan wilayah yang luas, menurut Jonan akan tidak efektif apabila dibangun pembangkit yang mengharuskan pengiriman bahan baku seperti gas yang ongkos pengirimannya saja sudah sangat tinggi. Pembangunan pembangkit listrik sistem *off grid* juga harus diimbangi dengan kualitas yang baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Jonan menginginkan PLN untuk *leading* dalam program listrik di Indonesia, akan tetapi bila tidak bisa maka akan diserahkan ke pihak swasta. Menurut Jonan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa apa-apa yang bisa dikerjakan oleh swasta maka dikerjakan swasta terlebih dahulu. Apabila tidak bisa maka didorong oleh BUMN; apabila tidak bisa juga baru dari APBN karena keterbatasan APBN tersebut. PLN juga diminta untuk fokus di transmisi kelistrikan karena apabila pembangkit sudah dibangun akan tetapi transmisi tidak ada maka kelistrikan nasional tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagai penutup, Jonan menyampaikan bahwa semua perizinan yang terkait kelistrikan harus dipercepat dan waktunya harus dipangkas agar efektif bagi semua pihak. (UH)

# Arahan Menteri ESDM Terkait Subsektor Ketenagalistrikan

*Menteri ESDM Ignasius Jonan memberikan pengarahan terkait subsektor ketenagalistrikan, salah satunya tentang penyederhanaan perijinan, pada Jumat (28/10).*



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta agar proses perizinan listrik bisa lebih cepat lagi. Kementerian ESDM selama ini telah berhasil mengurangi proses perizinan listrik hingga lebih cepat 72%. Proses yang awalnya 923 hari turun menjadi 526 hari. Akan tetapi Jonan melihat proses perizinan ini bisa dipersingkat lagi. Jonan mengatakan hal tersebut saat memberikan pengarahan pada pegawai Ditjen Ketenagalistrikan di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jumat (28/10).

"Pak Jokowi itu *concern* sekali akan proses pengurusan izin. Nanti kita coba duduk bersama untuk mengurangi proses itu," ujar Jonan.

Selain masalah perizinan, Jonan juga menaruh perhatian pada pemerataan distribusi listrik. "Harapan kita semua, pemerataan distribusi listrik musti ada. Sila kelima (Pancasila – red) sulit dicapai kalau itu tidak terjadi," Jonan menuturkan. Dia mengatakan hal ini merupakan tanggung jawab yang besar pada negara untuk membangun peradaban yang lebih baik bagi masyarakat.

Agar mencapai pemerataan tersebut, wilayah Indonesia harus terlistriki dari ujung barat hingga ujung timur. Untuk daerah-daerah bagian timur Indonesia seperti Papua, Jonan menyarankan pembangunan pembangkit dengan sistem *off*

*grid*. Menyadari kondisi geografis tiap daerah yang berbeda-beda, Jonan menyatakan pembangunan pembangkit harus disesuaikan pula dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah tersebut. "Kalau mau *off grid*, per daerah masing-masing supaya independen," tuturnya. Karena, dia melanjutkan, jika di Papua dibangun sistem *on grid* seperti di Jawa, biayanya akan sangat besar.

Sinergi dengan pihak lain penting untuk dilakukan. Jonan menyampaikan agar Ditjen Ketenagalistrikan selaku regulator bisa bekerja sama dengan baik dengan PT PLN (persero) sebagai BUMN yang paling erat kaitannya dengan subsektor ketenagalistrikan. Koordinasi dengan sesama unit eselon I di Kementerian ESDM, yakni dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) juga perlu terus dilakukan karena adanya bahasan yang beririsan terkait listrik.

Selain memberikan pengarahan, Jonan yang baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016 yang lalu ini juga berkenalan dengan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan. Sebelumnya, Jonan sudah pula mengunjungi unit eselon I lainnya di Kementerian ESDM seperti Sekretariat Jenderal, SKK Migas, Ditjen Migas, dan Ditjen Minerba. Jonan akan melanjutkan kunjungannya ke unit eselon I lainnya minggu depan. (AMH)

# Presiden Joko Widodo Kunjungi Booth Kementerian ESDM dalam IIICE 2016

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengikuti pameran *Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2016* di *Jakarta Convention Center (JCC)* yang dimulai Rabu ini (9/11). Pameran infrastruktur yang berlangsung selama tiga hari ke depan ini merupakan bagian dari *Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016*.

IIW 2016 dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Setelah membuka acara, Presiden berkesempatan mengunjungi *booth* Kementerian ESDM. Presiden mendapatkan penjelasan mengenai progres program 35.000 MW oleh juru penerang dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa acara ini melibatkan lebih dari 600 peserta exhibitor dari 37 negara, 1600 delegasi yang terdaftar mengikuti lima konferensi utama, 2002 pembicara dari dalam dan luar negeri, serta 22000 pengunjung yang sudah mendaftar online dari 16 provinsi di Indonesia.

"Kami meyakini dari acara ini akan terjadi perdagangan atau investasi infrastruktur untuk proyek-proyek infrastruktur yang ditampilkan dalam pameran ini," ujar Rosan.

Melihat animo peserta pameran dan pengunjung yang tinggi, Rosan menyatakan acara IIW 2016 ini membuktikan bahwa dunia usaha tetap optimistis untuk pembangunan Indonesia ke depan.

*Booth* Kementerian ESDM bergabung dalam paviliun Indonesia dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



*Presiden Joko Widodo mengunjungi booth Kementerian ESDM dalam pameran IIICE 2016 di Jakarta (9/11).*

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Kementerian ESDM menampilkan progres pembangunan infrastruktur di sektor ESDM dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Selain itu, ditampilkan pula layanan informasi Kementerian ESDM melalui Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait sektor ESDM. (AMH)



# Peluncuran Buku “Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga”



Penyerahan simbolis buku dilakukan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman kepada perwakilan peserta *coffee morning* di Jakarta (26/9).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meluncurkan buku “Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga” dalam acara *coffee morning* di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (26/9). Buku ini merupakan pelengkap Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) guna mempermudah pemahaman terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) PUIL 2011.

SNI PUIL 2011 merupakan standar wajib dalam mengatur pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah. Ini sesuai dengan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2014. Oleh sebab itu, SNI PUIL 2011 dijadikan acuan dalam perencanaan, pemasangan, dan pemeriksaan instalasi listrik tegangan rendah.

“Buku ini untuk referensi yang akan dipakai untuk petugas; baik instalatir, pemeriksa dalam pelaksanaan pemanfaatan listrik maupun dalam pemasangan peralatan listrik,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Buku “Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga” disusun oleh Ditjen Ketenagalistrikan dengan dukungan dari International Copper Association Southeast Asia (ICA SEA). Buku ini berisi

penjelasan praktis dan rinci mengenai penerapan ketentuan PUIL yang memuat secara detail tata cara pemasangan instalasi listrik.

“Kami sampaikan apresiasi pada Tim Penyusun atas jerih-payahnya sehingga buku ini tersusun dan juga untuk ICA SEA atas partisipasinya yang berharga,” Jarman menyampaikan. Penyerahan simbolis buku tersebut dilakukan oleh Jarman kepada empat perwakilan peserta *coffee morning*. Penjelasan mengenai ikhtisar buku ini dipaparkan oleh Bartien Sayogo dari Himpunan Masyarakat PUIL.

*Coffee morning* merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan Ditjen Ketenagalistrikan untuk menyampaikan informasi kepada *stakeholder* mengenai kebijakan dan regulasi terbaru di subsektor ketenagalistrikan. Selain meluncurkan buku, dalam *coffee morning* pada bulan September juga ada penjelasan mengenai Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2016 oleh Kepala Divisi Perencanaan Regional Kalimantan PT PLN (persero) Sudibyo. Selain itu, ada pula pemaparan tentang kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan Indonesia oleh *founder/chairman The Indonesian Institute of Energy Regulation (IIER)* Luluk Sumiarso. (AMH)

# Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan Disosialisasikan

Pemerintah menerbitkan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan melalui Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2016. Aturan ini melengkapi aturan jaringan sistem tenaga listrik yang telah ada sebelumnya, yakni: Jawa-Madura-Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Sosialisasi mengenai Aturan Jaringan tersebut dilakukan dalam acara *coffee morning* Ditjen Ketenagalistrikan di Jakarta, Senin (26/9).

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan merupakan peraturan, persyaratan, dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan, serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem Tenaga Listrik Kalimantan. Aturan ini disusun berdasarkan kondisi struktur Sistem Tenaga Listrik Kalimantan saat ini dan diberlakukan kepada semua pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik di Kalimantan.

Kepala Divisi Perencanaan Regional Kalimantan PT PLN (persero) Sudibyo menjelaskan Sistem Tenaga Listrik di Kalimantan terbagi menjadi tiga, yakni Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat (beban puncak 300,2 MW), Sistem Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (beban puncak 505 MW), dan Sistem Mahakam di Kalimantan Timur (beban puncak 407,6 MW). Selain itu, di Kalimantan ada pula subsistem Bangkanai-Muara Teweh-Buntok dengan beban puncak 18,1 MW.



Kepala Divisi Perencanaan Regional Kalimantan PT PLN (persero) Sudibyo menjelaskan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan, di Jakarta (26/9).

“Yang khas dari Sistem Tenaga Listrik Kalimantan adalah adanya interkoneksi sistem tenaga listrik antarnegara, yakni Sistem Khatulistiwa dengan Sarawak Energy Berhad (SEB),” ujar Sudibyo. Jaringan listrik ini melintasi Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan transmisi 275 KV.

Sudibyo kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan segera setelah Aturan Jaringan ini terbit, salah satunya adalah pembentukan Komite Manajemen Aturan Jaringan (KMAJ).

“KMAJ bertugas merumuskan *basic communication* implementasi aturan jaringan dan mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam implementasi,” Sudibyo menjelaskan. Untuk membantu tugas-tugasnya,

KMAJ perlu membentuk subkomite perencanaan dan pengoperasian.

Sudibyo melanjutkan, sosialisasi mengenai Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan juga perlu dilakukan kepada semua pelaku usaha pada Sistem Tenaga Listrik Kalimantan.

“Karena sifatnya yang dinamis dan adaptif, Aturan Jaringan harus selalu dimutakhirkan oleh KMAJ,” Sudibyo menambahkan. Pemutakhiran ini disesuaikan dengan perkembangan kondisi sistem, struktur usaha, serta perubahan kompleksitas sistem.

Sudibyo menutup paparan dengan menjelaskan secara ringkas inti dari tiap-tiap bab dalam Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan. (AMH)

# Pemerintah Harapkan Sumbangan Pemikiran *Kontraktor Ketenagalistrikan*



*Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul membacakan sambutan Dirjen Ketenagalistrikan dalam Munas AKLINDO 2016.*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengharapkan sumbangan pemikiran dari para kontraktor di bidang ketenagalistrikan. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan saat ini sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya dari kontraktor ketenagalistrikan. Untuk itu sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan di bidang ketenagalistrikan, para kontraktor diharapkan dapat mensinergikan gagasan, pemikiran, dan meningkatkan kebersamaan.

Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO).

sedang menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yakni Program 35.000 MW, termasuk pembangunan jaringan terkait untuk menyalurkan tenaga listrik. Hal ini menurutnya merupakan tantangan dan peluang para kontraktor untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program pembangunan tersebut.

Selain program pembangunan infrastruktur, tantangan lain yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara, MEA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN sehingga menjadi merata dan berdaya saing. Selain membuka arus perdagangan barang, jasa, modal dan investasi, MEA juga membuka pasar tenaga kerja profesional, termasuk tenaga ahli di bidang ketenagalistrikan.

meningkatkan kompetensi para anggotanya sehingga dapat berpartisipasi di pasar ASEAN," kata Alihuddin.

Kegiatan MUNAS AKLINDO mendapat apresiasi dari pemerintah karena diharapkan melalui MUNAS ini AKLINDO dapat tetap menjaga kompetensi, dan profesionalisme para anggotanya dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

"Kiranya acara ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik nasional," tutup Alihuddin. (PSJ)

Disampaikan Alihuddin, Pemerintah "AKLINDO diharapkan dapat

## *Kilas Balik Perumusan*

# Kebijakan Keselamatan Ketenagalistrikan



*Luluk Sumiarso dalam coffee morning di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (26/9) menjelaskan tentang sejarah perumusan kebijakan keselamatan ketenagalistrikan.*

Listrik selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya bagi manusia dan harta benda. Untuk itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membuat berbagai kebijakan terkait keselamatan ketenagalistrikan. Namun penyusunan kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja, ada proses panjang sehingga saat ini dikenal berbagai kebijakan terkait standarisasi ketenagalistrikan, sertifikasi badan usaha, hingga kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Ialah Dr. Luluk Sumiarso, salah seorang mantan pejabat di Kementerian ESDM yang memberikan andil besar terhadap terciptanya kebijakan di bidang keselamatan ketenagalistrikan.

Pada *coffee morning* (26/9) lalu, Luluk Sumiarso yang

pernah menjabat sebagai Dirjen LPE, Dijen Migas, Sekjen Kementerian ESDM, dan terakhir sebagai Dirjen EBTKE ini menjelaskan sejarah tonggak keselamatan ketenagalistrikan. Luluk menceritakan bahwa pada tahun 1998, dibentuk Direktorat Teknik Ketenagalistrikan di lingkungan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE). Ia pun segera mencari hakekat dari regulasi keteknikan dimana pada dasarnya adalah pemberlakuan SNI menjadi Standar Wajib oleh pemberi otoritas dalam hal ini Menteri Pertambangan dan Energi Ditjen LPE.

Setelah itu ia bersama tim membuat Kerangka Regulasi Keteknikan Sektor Ketenagalistrikan bersama *stakeholder* listrik untuk mewujudkan kondisi efisien, andal, aman dan

## Warta Kita



*Peserta coffee morning Ditjen Ketenagalistrikan menyimak paparan materi dari Luluk Sumiarso.*

akrab lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Dalam menyusun kebijakan terkait keselamatan ketenagalistrikan, Luluk mengaku terinspirasi dari Keselamatan Penerbangan dalam dunia penerbangan. "Disana perlu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Sertifikasi Kelaikan Pesawat yang dikeluarkan oleh Otoritas," papar Luluk.

Untuk itulah dalam bidang ketenagalistrikan segera dikembangkan konsep Keselamatan Ketenagalistrikan antara lain perlu Kawasan Keselamatan Operasi Ketenagalistrikan semisal ROW, pemberlakuan PUIL 2000 oleh Otoritas Listrik (Menteri ESDM), serta Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Otoritas atau Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Otoritas.

Menurut Luluk, konsep 'Keselamatan Ketenagalistrikan' tidak hanya mencakup keselamatan untuk pekerja (K3) saja, tetapi juga mencakup keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi.

"Obyek utama regulasi keteknikan adalah Instalasi Ketenagalistrikan dan Tenaga Teknik, yaitu yang membangun dan mengoperasikan instalasi," ungkap Luluk.

Instalasi Ketenagalistrikan menurutnya terdiri dari penyediaan seperti peralatan dan instalasinya, serta pemanfaatan yaitu instalasi pelanggan dan pemanfaat. Dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, ia menemukan bahwa untuk tenaga teknik ketenagalistrikan, yang disertifikasi

adalah kompetensinya, yang kala itu belum digunakan secara nasional.

"Maka mulai dikembangkanlah sistem sertifikasi kelaikan untuk instalasi ketenagalistrikan dan sistem sertifikasi kompetensi untuk tenaga teknik ketenagalistrikan," jelasnya.

Luluk menjelaskan bahwa kompetensi ketenagalistrikan adalah hal yang penting terkait keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Keterampilan yang dibutuhkan menurut Luluk terkait dengan mengelola pekerjaan (*Task Management Skill*), mengantisipasi kemungkinan (*Contingency Management Skill*), mengelola lingkungan kerja (*Job/Role Environment Skill*), serta keterampilan beradaptasi (*Transfer Skills*).

Ke depan, Luluk berharap bahwa Ditjen Ketenagalistrikan sebagai regulator dapat terus melakukan pembinaan, pemberlakuan, pengawasan, pengembangan, harmonisasi, serta rekognisi untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. (PSJ)

# Laporan dari Myanmar: Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri The 34<sup>th</sup> AMEM



*Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menjadi SOE LEader The 34th ASEAN Minister on Energy Meeting yang diselenggarakan di Myanmar, 19-20 September 2016.*

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman selaku ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leader Indonesia memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Persiapan untuk Pertemuan Tingkat Menteri Energi ASEAN The 34th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM-34) & its Associated Meetings yang berlangsung pada tanggal 19–20 September 2016 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Dalam pertemuan tersebut Jarman didampingi oleh sejumlah pejabat dari Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan perwakilan PT Pertamina. Pertemuan AMEM-34 and its

Associated Meetings akan diselenggarakan di tempat yang sama. Rangkaian pertemuan tersebut terdiri atas Pertemuan AMEM-34, Pertemuan 5th AMEM-IEA Dialogue, 10th EAS-EMM, 13th AMEM+3, dan Minister-CEO Dialogue.

Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 19–20 September 2016 adalah pertemuan para ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leaders untuk mempersiapkan laporan dan bahan masukan yang akan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri antar Menteri Energi ASEAN dan dengan mitra wicara.

## Warta Kita

Pertemuan ini membahas perkembangan kerjasama energi ASEAN tahun 2015-2016 dan rencana kegiatan 2016-2017 dari setiap program area, yaitu: (i) *Clean Coal Technologies*, (ii) *Civilian Nuclear Energy*, (iii) *Regional Energy Policy and Planning*, (iv) *Renewable Energy*, (v) *Energy Efficiency and Conservation* (vi) *ASEAN Energy Regulators' Network*. Selanjutnya pertemuan menyepakati sejumlah poin rekomendasi yang akan dibawa pada Pertemuan AMEM-34 tanggal 21-23 September 2016.

Selain itu, para pejabat tinggi juga membahas konsep *Joint Ministerial Statement (JMS)* para Menteri Energi ASEAN untuk masing-masing Pertemuan ke-34 AMEM, Pertemuan ke-13 AMEM+3, Pertemuan ke-10 EAS-EMM dan Pertemuan ke-6 AMEM-IEA.

### PERTEMUAN-PERTEMUAN BILATERAL

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman selaku *ASEAN Senior Official on Energy (SOE) Leader* Indonesia dalam Pertemuan tingkat Menteri Energi ASEAN *the 34th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM-34) & its Associated Meetings* mewakili Plt. Menteri ESDM bertemu dengan *Vice Administrator* pada *China's National Energy Administration* Li Fanrong Rabu (21/9) di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Dalam pertemuan informal tersebut kedua pejabat membicarakan dan menyepakati perlunya dihidupkan kembali forum dialog pemerintahan dan swasta yaitu *Indonesia - China Energy Forum (ICEF)*. Kedua pejabat juga menyepakati penyelenggaraan ICEF secara dua tahunan dan bergantian antara kedua negara.

Sebagai informasi, ICEF merupakan forum pertemuan pemerintah dan pengusaha dari kedua negara yang membahas aspek kebijakan, regulasi, ekonomi dan teknologi dalam rangka pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Usai bertemu dengan Li Fanrong, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman juga bertemu dengan Alan Yu, *Deputy Assistant Secretary* pada *U.S. Department of Energy (DOE)* dan Jamie Kern, *Senior Fellow* pada *U.S. DOE, Office of International Affairs*, Rabu (21/9). Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian *the 34th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM-34) & its Associated Meetings*.

Dalam kesempatan pertemuan informal tersebut, kedua pejabat membicarakan sejumlah isu terkait kondisi energi terkini dan kerjasama yang terjalin antara kedua negara.

Beberapa hal yang dibicarakan antara lain posisi Indonesia dalam pemenuhan energi dalam negeri melalui Kebijakan Energi Nasional, di mana kebijakan Pemerintah Indonesia menetapkan batas atas 50% penggunaan batubara dalam energy mix untuk pembangkitan tenaga listrik. Selain itu Jarman menjelaskan bahwa Indonesia mengurangi minyak bumi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025, yang mana bila tidak tercapai akan didorong pemanfaatan gas untuk memenuhinya.

Terkait dengan subsidi, Jarman menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia agar warga negara, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, dapat menikmati akses listrik yang sama keandalan dan harganya.

"Untuk itu Pemerintah Indonesia memberikan subsidi hanya terhadap masyarakat dan tidak kepada badan usaha ataupun energi primernya," jelas Jarman. Penentuan *Tariff Adjustment* dijelaskan Jarman sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh badan usaha, yaitu nilai tukar U.S. Dollar terhadap Indonesian Rupiah, *Indonesian Crude Price (ICP)* dan/atau inflasi. Sehingga agar badan usaha dapat memperoleh margin keuntungan yang lebih besar, maka badan usaha tersebut harus menjadi lebih efisien dalam operasionalnya dan mengurangi susut jaringan.

Diskusi berlanjut membahas tentang batubara dan pemanfaatan teknologi untuk energi yang lebih bersih. Terkait dengan hal itu, Jarman menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan membutuhkan energi untuk menyokong pertumbuhan tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya energi yang tersedia menjadi prioritas dan dengan penerapan teknologi untuk batubara yang bersih diharapkan dapat mengurangi emisi dan peningkatan efisiensi (HELE: *High Efficiency Low Emission*).

Namun Jarman memberi catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu pemanfaatan teknologi itu harus berbasis komersial karena penerapan teknologi seharusnya akan berdampak pada penurunan tarif pemanfaatan, dan bukan malah sebaliknya akan membebani masyarakat Indonesia.

Di akhir diskusi, Alan menyampaikan bahwa meskipun tahun depan 2017 merupakan tahun politik bagi Amerika Serikat, kebijakan Pemerintah Amerika Serikat akan mempertahankan momentum dan menjaga kemitraan dengan negara mitra untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.



### PENGHARGAAN ASEAN ENERGY AWARD 2016

Beberapa perusahaan dan instansi di Indonesia mendapat penghargaan dalam *ASEAN Energy Award 2016*. Penghargaan ini merupakan penghargaan bagi para praktisi terbaik dalam pemanfaatan dan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi di kawasan ASEAN.

Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan dalam gala dinner *AMEM-34 & its Associated Meetings* yang berlangsung di Myanmar, Kamis (22/9). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jerman yang hadir mewakili Plt. Menteri ESDM ikut menyerahkan penghargaan *ASEAN Energy Award*.

Berikut daftar pemenang ASEAN Energy Award 2016 asal Indonesia:

#### Bidang Konservasi Energi

- *Winner – Small & Medium Building Category:*  
Apartment Scientia Residences, Summarecon Serpong, Tangerang-Indonesia, dan diterima oleh Wikhu Himawan dan Budi Utomo,
- *1st Runner-up – Small & Medium Industry Category:*  
PT. Phapros, Tbk, Indonesia dan diterima oleh BM. Ali,
- *Winner – Industry Special Submission Category:*  
PT. Petrokimia Gresik, Indonesia. Penghargaan diterima oleh Anis Ermani and Muhammad Rizal,
- *2nd Runner-up – New & Existing Category:*  
*Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD*, Indonesia

dan penghargaan diterima oleh Dony Rahajoe dan Ilham Wahyudi,

- *Winner – Tropical Building Category:*  
*Green School Bali*, Indonesia, dan penghargaan diterima oleh Kadek Antara,
- *Winner – Large Green Building Category:*  
*Main Building of Ministry Of Public Works and Housing (PWHh)*, Indonesia dan penghargaan diterima oleh Agni Budi Satrio, Devi Loviardy, Rana Yusuf Nasir, Jarmika Adi Suryabrata, Rani Charisma Dewi dan Rahyu Kriscahyorini.

#### Bidang Energi Terbarukan

- *Winner – Wave Marine Energy Power Plant Pendullum/Balls Method*, Indonesia, dan
- *2nd Runner-up – Gunung Sawur Microhydro Power Plant: for Sumber Wuluh community.* (RBS)

# Pemerintah Dorong *Clean Coal Technology* untuk PLTU Batubara

Pemerintah mendorong penggunaan teknologi efisiensi tinggi seperti *Clean Coal Technology* (CCT) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara. Teknologi ramah lingkungan untuk PLTU tersebut sesuai dengan *Paris Agreement* pada Konvensi Para Pihak (*Conferences of Parties-COP*) UNFCCC ke-21 di Paris tahun 2015 lalu. Teknologi PLTU bersih melalui CCT merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi yang tidak lebih dari 2 derajat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jerman, saat menyampaikan sambutan pada workshop *Building Pathways for High Efficiency Low Emissions Coal in Indonesia* yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (6/9).

Disampaikan Jerman, kebutuhan batubara untuk PLTU saat ini mencapai 87,7 juta ton. Seiring dengan pembangunan program ketenagalistrikan 35.000 MW, kebutuhan batubara diperkirakan meningkat menjadi 166,2 juta ton pada tahun 2019. PLTU batubara disebut Jerman mendominasi Program 35.000 MW dengan porsi sebesar 56,97% dari total pembangkit listrik yang direncanakan.

Jerman menyampaikan bahwa kegiatan pengoperasian PLTU batubara mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup seperti menimbulkan emisi gas buang, air limbah dan limbah padat yang mempengaruhi kesehatan kita semua terutama emisi gas buang. Secara lokal emisi gas buang berdampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya seperti emisi SO<sub>x</sub> dan NO<sub>x</sub> yang menyebabkan hujan asam, penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) dan lain sebagainya.

"Namun secara global (bumi) emisi gas buang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim akibat dari banyaknya emisi CO<sub>2</sub> yang dihasilkan dari

aktivitas PLTU Batubara," ungkapnya.

Pada COP-21 di Paris, Presiden Joko Widodo telah mendeklarasikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk ikut aktif menurunkan emisi CO<sub>2</sub> (Gas Rumah Kaca-GRK) sebesar 29% di tahun 2030. Selain itu menurut Jerman melalui dokumen *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs), Indonesia mencantumkan kegiatan pembangunan PLTU Batubara dengan menggunakan teknologi efisiensi tinggi seperti *Clean Coal Technology* untuk mencapai 29% penurunan emisi GRK di tahun 2030.

Workshop yang diselenggarakan dalam satu hari ini merupakan acara yang diselenggarakan Kementerian LHK bekerja sama dengan *World Coal Association*. Peserta workshop selain dari instansi pemerintah juga mengundang perusahaan-perusahaan, perguruan tinggi, dan LSM. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alhuddin Sitompul juga menyampaikan presentasi tentang *roadmap* penggunaan *Clean Coal Tehnology* di Indonesia. (PSJ)

# Menteri ESDM

## Tengah Siapkan Aturan untuk Melistriki 2.510 Desa



*Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah menyiapkan Rancangan Permen ESDM terkait Percepatan Elektrifikasi melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.*

Untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi, khususnya melistriki 2.510 desa yang belum mendapat listrik, Menteri ESDM Ignasius Jonan tengah menyiapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Percepatan Elektrifikasi melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Jonan menyatakan bahwa untuk melistriki desa-desa tersebut, kemampuan pendanaan PLN saja tidak cukup sehingga memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, atau koperasi dan badan usaha milik negara lainnya untuk menyediakan tenaga listrik *off-grid* dengan sistem distribusi terintegrasi, khususnya di daerah perdesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan yang berlokasi di pulau kecil.

Hal tersebut disampaikan Jonan pada konferensi pers, Rabu (23/11) malam. Konferensi pers sendiri terkait

pemberlakuan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pembangunan kilang minyak dalam negeri oleh badan usaha swasta, serta harga gas bagi 3 sektor industri.

Dalam konsep Permen ESDM tersebut disebutkan bahwa dari 2.510 desa yang belum mendapat listrik sama sekali, dan 2.373 desa diantaranya berada di Pulau Papua dengan rincian 2.111 desa di Provinsi Papua dan 262 desa di Provinsi Papua Barat.

"Kita sedang menyiapkan aturannya, jaringan listrik yang dibutuhkan tidak perlu transmisi tegangan tinggi, cukup tegangan menengah dan sedang," kata Jonan.

Dasar hukum yang digunakan dalam rancangan Permen ESDM ini adalah UU 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) dan PP 14 Tahun 2012 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 9 ayat

## Warta Kita

(3). Skema yang diberlakukan untuk melistriki desa-desa tersebut sesuai dengan Permen ESDM nomor 07 Tahun 2016 Jo Permen ESDM nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

Melalui Permen ESDM untuk melistriki desa-desa ini, pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi berbadan hukum Indonesia yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Melalui Permen ESDM ini nanti, badan usaha berkewajiban mengoptimalkan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan setempat dan dapat diberikan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Energi yang digunakan harus tepat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” tegas Jonan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam konferensi pers tersebut memberikan contoh bagaimana suatu perusahaan daerah di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mampu melistriki daerahnya sendiri dengan penetapan wilayah usaha tenaga listrik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan Daerah tersebut menurut Jarman dapat melistriki tiga kecamatan dengan total pelanggan sebanyak enam ribu orang. Jarman berharap penetapan wilayah usaha dapat ditiru oleh daerah-daerah lain namun harus memperhatikan potensi energi setempat. (PSJ)



# Peringati HLN Ke71, Masyarakat Ketenagalistrikan Gelar *Fun Bike*



Elemen Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada Minggu (16/10) menggelar *fun bike* di kantor PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat (TJBB), Gandul Cinere Depok. Acara ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Listrik nasional (HLN) ke-71 yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2016. Sekitar 300 peserta *fun bike* berasal dari keluarga besar Kementerian ESDM, PT. PLN (Persero) se-Jabodetabek, MKI, dan *stakeholder* ketenagalistrikan. Ketua pelaksana HLN ke-71, Noesita Indriani menyebutkan bahwa *fun bike* dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu *track* 10 km dan *track* 30 km. (PSJ)

# Galeri





*PPNS Ketenagalistrikan yang baru dilantik berfoto bersama. Pelantikan dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta (28/9).*

# 25 PPNS Ketenagalistrikan Dilantik

Sebanyak 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan dinas ESDM tingkat provinsi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Rabu pagi (28/9). Pelantikan bertempat di Gedung Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan PPNS di subsektor ketenagalistrikan ini juga dibarengi dengan pelantikan PPNS dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2012 disebutkan bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dengan demikian, PPNS Ketenagalistrikan memiliki kewenangan dalam penegakan

aturan pidana dalam lingkup UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan PPNS dilakukan oleh Direktur Pidana Salahuddin yang mewakili Dirjen Administrasi Hukum Umum. Slamet Riyadi dan Dadi Mulyadi menjadi perwakilan PPNS yang baru dilantik untuk menandatangani berita acara sumpah jabatan PPNS. Bertindak selaku saksi adalah Kepala Subdit PPNS Muhammad Fajar dan Kepala Seksi Pengangkatan, Pemutasian, dan Pemberhentian PPNS Bambang Wijanarko.

"Dengan selesainya acara pelantikan ini, secara yuridis formal Bapak/Ibu telah siap untuk mengemban tanggung-jawab sebagai aparatur penegak hukum di tempat tugas masing-masing," ujar Salahuddin mengawali sambutannya. Ia mengingatkan bahwa PPNS harus menyadari fungsi dan perannya sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia.

## Warta Kita



*Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan PPNS dilakukan oleh Direktur Pidana Salahuddin yang mewakili Dirjen Administrasi Hukum Umum.*



*Pemberian ucapan selamat oleh Direktur Pidana Salahuddin kepada PPNS yang baru dilantik.*



*Penandatanganan berita acara sumpah jabatan PPNS.*



*Pelantikan PPNS dihadiri pula oleh perwakilan dari Ditjen Ketenagalistrikan.*

Salahuddin menyampaikan bahwa PPNS dituntut untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari pimpinan dan instansi masing-masing.

"Sebagai aparaturnya penegak hukum, harus memiliki dedikasi yang tinggi, percaya diri, tidak boleh ragu-ragu. PPNS juga harus menguasai substansi dan integritas yang baik," Salahuddin menekankan. Ia menambahkan, "Perlu adanya dukungan komitmen dari pimpinan di unit masing-masing untuk mengoptimalkan fungsi Bapak/Ibu."

Lebih lanjut, Salahuddin menyadari pentingnya aspek pembinaan PPNS. Ia menghimbau tiap-tiap instansi dapat mendorong PPNS agar bisa lebih berani memegang perkara yang menjadi kewenangannya.

Sebelum diangkat menjadi PPNS, ada pelatihan yang mesti dijalani. Salahuddin berharap pengetahuan dan ketrampilan yang didapat saat diklat dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Semoga Saudara-saudara sekalian mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan dalam menjalankan tugas tersebut," pungkask Salahuddin.

Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Ketenagalistrikan Tanty Wijayani, Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Jisman Hutajulu, Kasubdit Perlindungan Konsumen Listrik Ridwan, serta pejabat dari Ditjen Administrasi Hukum Umum dan BNP2TKI. (AMH)

# Resensi Buku

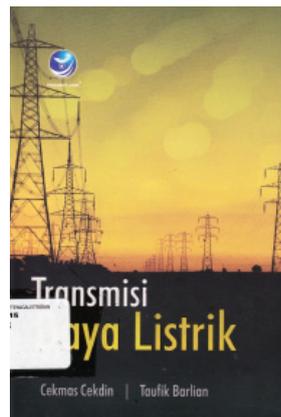


**Judul : Cara Pintar Berbicara Cerdas di Depan Publik**  
**Pengarang: Balqis Khayyirah**  
**Data Terbit: 2013: Jogjakarta, Diva Press**  
**Data Fisik: 21 cm, 190 hlm.**

Walaupun rata-rata umat manusia dibekali dengan kemampuan berbicara, namun tidak semua orang mampu berbicara dengan baik di depan orang banyak. Berbicara di depan publik memang merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Gampang bagi mereka yang sudah profesional, tetapi susah bagi orang yang belum terbiasa. Sehingga, tak heran jika banyak orang menolak ketika diminta untuk mengisi suatu acara, seperti berpidato, ceramah, atau penerjemah diskusi.

Seperti kita ketahui, berbicara merupakan salah satu aktivitas komunikasi. Dan, yang namanya komunikasi di zaman yang serba modern ini, sangatlah penting. Sebab tanpa komunikasi, seseorang tidak bisa mengembangkan potensinya, baik potensi untuk kaya, pintar, maju, menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, komunikasi adalah satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain

Buku ini tidak hanya menawarkan solusi guna mengatasi masalah kemampuan berbicara pembaca, tetapi juga menawarkan cara lain dalam melatih kemampuan berbicara pembaca dihadapan publik. Dilengkapi dengan tips, teknik, cara dan trik pintar berbicara di depan publik ala para profesional seperti Steve Jobs, Al Gore atau Anies Baswedan.



**Judul : Transmisi Daya Listrik**  
**Pengarang: Cekmas Cekdin dan Taufik Barlian**  
**Data Terbit: 2013: Yogyakarta, Andi**  
**Data Fisik: 23 cm, viii, 184 hlm.**

Buku ini merupakan buku pegangan terutama bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro dalam bidang Tenaga Listrik, dan sebagai buku referensi bagi perorangan yang berkecimpung dalam sistem tenaga listrik.

Buku ini membahas secara sistematis dan praktis agar dapat dengan mudah dipahami. Pada setiap bab terdapat contoh soal dan penyelesaian sekaligus dengan formulanya. Teori yang diberikan singkat dan padat, disertai contoh dan penyelesaian yang lengkap dan tuntas.

Dengan membaca buku ini maka pembaca akan mengerti lebih luas tentang transmisi daya listrik. Pokok bahasan dalam buku ini mencakup: prinsip-prinsip dasar, diagram satu garis dan sistem per unit, parameter-parameter pada saluran transmisi dan penyaluran daya listrik

**Resensi oleh:**  
**Dina Andriani**  
**Pustakawan Muda**

# Lulusan SMK Ketenagalistrikan Diharap Menjadi Tenaga Terampil Level Satu



*Penandatanganan kesepakatan bersama antara Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta (30/9).*

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Ketenagalistrikan diharapkan menjadi tenaga kerja terampil di bidang ketenagalistrikan. Tenaga kerja terampil tersebut tidak hanya dari sisi hulu atau pembangkitan saja, namun juga dari sisi hilir yaitu transmisi dan distribusi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud tentang Peningkatan Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan pada Peserta Didik

Sekolah Menengah Kejuruan. Acara yang diselenggarakan Jumat (30/9) di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta ini dihadiri oleh pejabat dari kedua instansi dan perwakilan badan usaha ketenagalistrikan.

Perjanjian ini menurut Jarman sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan MoU ini, semua anak didik yang lulus dari SMK Ketenagalistrikan dan telah melalui ujian, otomatis memperoleh sertifikasi tenaga kerja level Satu untuk tegangan rendah. "Dengan

## Warta Kita



*Dirjen Ketenagalistrikan menyerahkan secara simbolis Buku 'Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga' yang disusun oleh Ditjen Ketenagalistrikan dengan dukungan dari International Copper Association Southeast Asia (ICA SEA)*

kompetensi ini, lulusan SMK Ketenagalistrikan bisa bekerja di kontraktor atau lembaga inspeksi teknik," jelas Jarman.

Menurut Jarman, setiap tahun sambungan listrik untuk rumah diperkirakan 3,5 juta sambungan, atau rata-rata 15.000 per hari. Hal ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan teruji. "Belum lagi instansi pemanfaat tenaga listrik lainnya memerlukan orang-orang yang berkompetensi," jelas Jarman.

Untuk itu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki kebijakan untuk mendaftarkan tenaga kerja berkompeten sehingga badan usaha diwajibkan menggunakan tenaga kerja yang telah bersertifikasi. "Orang yang tidak terdaftar tidak dapat dipakai oleh lembaga instalatur," paparnya.

Dalam penandatanganan tersebut disampaikan juga buku 'Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah untuk Rumah Tangga' yang disusun oleh Ditjen Ketenagalistrikan dengan dukungan dari *International Copper Association Southeast Asia* (ICA SEA). Buku ini diharapkan menjadi buku panduan peserta didik SMK Ketenagalistrikan sebagai standard belajar.

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengembangan kompetensi peserta didik SMK sebagai calon

tenaga kerja bidang ketenagalistrikan, menyempurnakan kurikulum dan proses pembelajaran bermutu di SMK, serta melaksanakan program dan kegiatan praktik kerja lapangan dan sertifikasi bagi pendidik dan peserta didik SMK. Pemilihan lokasi SMK akan disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja yang disediakan oleh Kementerian ESDM. (PSJ)

# Pimpinan Ditjen Gatrik dan KPK Urai Persoalan-Persoalan di Bidang Ketenagalistrikan



Kepala GN-PSDA KPK Dian Patria (kiri) dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) dalam FGD membahas sektor ketenagalistrikan (5/10).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dan para Direktur di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Rabu (5/10) menyampaikan berbagai persoalan dan upaya pemecahan masalah sektor ketenagalistrikan di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara yang dikemas dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) ini dimoderatori oleh Dian Patria, Kepala Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN PSDA) KPK.

Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan dalam rangka mencari solusi dari *compliance* permasalahan yang telah di inventarisasi dari hasil Koodinasi dan Supervisi (korsup) yang telah dilaksanakan di lima kota beberapa waktu sebelumnya. Koordinasi dan Supervisi KPK sektor energi tahun ini telah dilaksanakan di Pekanbaru, Balikpapan, Mataram, Surabaya dan Padang.

Korsup Sektor Energi sendiri diawali dengan diadakannya rapat koordinasi di KPK pada tanggal 15 Februari 2016 yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, beberapa gubernur, bupati dan walikota, yang pada waktu itu secara bersama berkomitmen untuk melakukan perbaikan penataan pengelolaan energi secara menyeluruh.

"Korsup ini sebagai Gerakan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi," ungkap Jarman.

Pembahasan utama dari masing-masing sesi yaitu mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor seperti tumpang tindih lahan, perijinan, lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan dan sebagainya. Serta pemenuhan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban administrasi, keuangan, teknis, sosial, dan lingkungan. Tidak kalah penting beberapa hal yang disampaikan adalah *compliance* data sektor energi yang harus dipenuhi oleh *stakeholder* seperti permintaan data yang telah di sampaikan oleh KPK kepada Kementerian ESDM.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menjelaskan landasan hukum ketenagalistrikan nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya terkait program 35.000 MW. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanita dalam kesempatan tersebut menjelaskan upaya-upaya pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan, khususnya terkait beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam pengurusan izin. Beberapa persoalan yang menyangkut izin dan kewenangan pemerintah daerah juga disampaikan sehingga KPK dapat mengetahui persoalan yang ada di lapangan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan aspek-aspek terkait keselamatan ketenagalistrikan. Ia menjelaskan bahwa aspek keselamatan harus dipahami oleh setiap orang khususnya badan usaha ketenagalistrikan. "Instalasi listrik harus aman, dibuktikan dengan memiliki sertifikat laik operasi, pemasangan instalasi dilaksanakan oleh badan usaha yang bersertifikat, dan dilakukan oleh tenaga kerja yang bersertifikat pula," ungkap Munir. Acara FGD berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan dilanjutkan dengan pembahasan antara KPK dan Ditjen EBTKE. (PSJ)

# Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71

Suara iringan lagu yang berasal dari *marching band* terdengar sejak pukul 7 pagi, Selasa (4/10) di lapangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Para pengatur upacara juga terlihat merapikan barisan peserta upacara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71. Tema rangkaian acara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi tahun ini adalah "Dengan Semangat Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Kita Tingkatkan Kerja Nyata Melalui Inovasi".

Acara ini dilaksanakan dengan maksud mengajak semua pemangku kepentingan di sektor ESDM dan masyarakat untuk meningkatkan kerja nyata melalui terobosan inovasi. Sehingga setiap inovasi yang tercipta dapat memberikan

memberikan kemudahan dan dampak yang positif bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang telah digagas Kementerian ESDM dan telah masuk dalam top inovasi pelayanan publik secara nasional di antaranya adalah Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, e-Lelang dari Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi, dan *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Rangkaian acara Hari Jadi Pertambangan dimulai dengan pelaksanaan upacara. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada beberapa unsur di lingkungan Kementerian ESDM, di antaranya adalah



Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan berfoto bersama mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Arcandra Tahar setelah upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71, di Jakarta (4/10).

## Warta Kita



**Kiri atas** - Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan selaku pembina upacara menyampaikan sambutan.

**Kanan atas** - Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menjadi salah satu petugas upacara.

**Kiri bawah** - Pegawai Kementerian ESDM mengikuti upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71.

penganugerahan penghargaan energi tahun 2016, penyerahan SK kenaikan pangkat, penghargaan kompetisi *innovation award*, penghargaan lomba karya jurnalistrik, dan penyerahan SK Agen Perubahan.

Upacara dipimpin oleh Plt. Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan. "Saya yakin selama ini kita telah melakukan berbagai inovasi dan saya mengapresiasi hal tersebut. Inovasi tidak boleh berhenti, perlu terus dikembangkan untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan," ujar Luhut.

Luhut menyampaikan bahwa ia bangga melihat semua pihak Kementerian ESDM bekerja dengan cepat melakukan perubahan di berbagai bidang. Luhut juga berpesan agar Kementerian ESDM dapat membangun satu kerjasama tim yang baik dalam mempercepat semua prosedur yang ada sehingga bisa menghilangkan kendala-kendala yang menghambat proses pengambilan keputusan.

"Saya juga melihat ada kemajuan dalam penyelesaian UU Minerba, saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu

lama, dalam minggu-minggu depan Peraturan Pemerintah untuk itu sudah bisa kita tuntaskan." ungkap Luhut. Luhut meminta Kementerian ESDM mempermudah investor-investor untuk melakukan investasi di dalam negeri pada bidang pertambangan dan energi.

"Saya minta kepada semua jajaran di Kementerian ESDM untuk berkerja sama dalam tim untuk melayani untuk membuat yang terbaik untuk negeri ini," tutup Luhut sambil mengakhiri amanat sebagai pemimpin upacara.

Setelah acara upacara selesai, dilakukan pertunjukan *marching band* dari STEM Aka Migas. Pemutaran film sejarah pertambangan juga dilakukan sebelum mengakhiri rangkaian acara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-71. Selain itu dilaksanakan juga aksi sosial donor darah dan pembagian paket sembako kepada pihak-pihak yang membutuhkan di lingkungan Kementerian ESDM. Semua peserta peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi tampak antusias mengikuti rangkaian acara ini. (UH)

# IBEA 2016

## *Dorong Peningkatan Local Content*

*Tumiran dalam pembukaan IBEA 2016 (13/10) berharap pemerintah dapat membuat regulasi untuk meningkatkan pemakaian produk domestik di sektor ketenagalistrikan.*



Ditjen Ketenagalistrikan turut berpartisipasi dalam Pameran Kelistrikan dan Simposium *Indonesia Best Electricity Award* (IBEA) 2016 yang diselenggarakan di *Birawa Assembly Hall*, Bidakara Hotel Jakarta. Acara yang digagas oleh Listrik Indonesia ini berlangsung dua hari pada 13-14 Oktober 2016. Dalam pameran ini, Ditjen Ketenagalistrikan menampilkan inovasi pelayanan publik seperti registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) online yang masuk menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun ini.

Ajang penghargaan IBEA menasar pelaku usaha ketenagalistrikan yang memberikan dampak positif bagi infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia. Tahun ini ada tujuh kategori yang dilombakan. IBEA yang digelar kembali tahun ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan *local content* di industri ketenagalistrikan. Demikian disampaikan oleh Tumiran selaku ketua dewan juri IBEA 2016.

IBEA pertama kali dilaksanakan di Surabaya pada tahun 2015. Tahun ini, Tumiran menjelaskan, penilaian IBEA berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain lebih lengkap,

juri IBEA B2016 juga lebih mempunyai pengalaman dan kompetensi.

Tumiran menyampaikan bahwa sistem penilaian kombinasi dilakukan untuk mengukur semaksimal mungkin potret dari perusahaan.

"Ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan bagaimana IPP (*Independent Power Producer* - red.) bekerja lebih efisien, bagaimana kemampuan kita di EPC (*Engineering, Procurement & Construction* - red.), dalam peningkatan *local content*, dan bagaimana kita melihat *supporting* industri nasional kita untuk menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional," Tumiran menjelaskan dalam pembukaan IBEA pada Kamis (13/10). Ia menyatakan IBEA 2016 turut serta mendukung pembangunan infrastruktur dan industri yang berwawasan lingkungan.

Terkait *local content*, ia mengharapkan pemerintah selaku regulator dapat membuat regulasi seketat mungkin untuk upaya-upaya peningkatan pemakaian produk domestik.

## Warta Kita



Para pemenang Top 10 dalam IBEA 2016. IBEA mendorong peningkatan *local content* di sektor ketenagalistrikan.

"Saya mengharapkan *local content* kita meningkat. Kerjasama yang sinergis perlu diupayakan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor," lanjutnya, "Kalau produk domestik tidak dikembangkan, industri domestik kita tidak tumbuh dan ketahanan energi nasional tidak tercapai."

Tumiran yang juga anggota Dewan Energi Nasional ini menyatakan salah satu instrumen ketahanan energi nasional adalah penguasaan teknologi. "Kita bisa, asal ada payung regulasinya," ujarnya optimistis.

Apresiasi diberikan atas pergeseran paradigma pembangunan IPP. "Pembangunan IPP memakai tenaga asing, sekarang sudah terjadi pergeseran. Ini secara bertahap harus kita lakukan. Tidak mungkin kalau dalam Program 35.000 MW, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusianya tergantung negara lain," ia menyampaikan. Tumiran mengharapkan dukungan dari para pelaku usaha karena tanpa dukungan dari *stakeholder*, upaya-upaya tersebut akan sulit dilakukan.

Dirjen Ketenagalistrikan dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul menyampaikan bahwa IBEA diharapkan dapat menjadi ajang saling bertukar pikiran dalam mengembangkan inovasi di sektor ketenagalistrikan.

Kabar baik datang dari industri permesinan dalam negeri. Kepercayaan terhadap industri permesinan dalam negeri

semakin tinggi, khususnya dalam pelaksanaan Program 35.000 MW. Demikian dituturkan Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Industri - Kementerian Perindustrian, Dyah Winarni Poedjiwati.

"Kami merasakan besarnya harapan pada industri dalam negeri untuk buktikan kemampuan demi tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas," ujarnya saat malam penganugerahan IBEA 2016 (14/10).

Lebih lanjut, Dyah mengatakan Kementerian Perindustrian berupaya meningkatkan peran industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Salah satu industri yang diprioritaskan di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional adalah industri pendukung pembangkit energi.

"Industri permesinan dalam negeri telah mampu mendesain dan memproduksi produk-produk pendukung pembangkit listrik seperti turbin, boiler, generator, transformer, kwh meter, kompresor, dan lainnya," lanjut Dyah.

Topik mengenai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) memang mengemuka dalam gelaran IBEA 2016. Tumiran yang menjadi ketua dewan juri IBEA 2016 mengharapkan *local content* di sektor ketenagalistrikan meningkat, termasuk dalam Program 35.000 MW. Senada dengan pernyataan Tumiran, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul juga mendukung peningkatan TKDN dalam sektor ketenagalistrikan.

"Kalau Program 35.000 MW jadi pasar negara lain, kita bisa merugi," Alihuddin menegaskan.

Selain menaruh perhatian pada peningkatan TKDN, Kementerian Perindustrian juga sedang berupaya menyebarkan industri ke luar Jawa untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini 70% populasi industri berada di Jawa. Pada tahun 2035, komposisi industri yang di luar Jawa 40% dan Jawa 60%. Untuk itu, perlu adanya dukungan pasokan listrik yang cukup.

"Kami mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk menyediakan pasokan listrik di daerah industri baru di luar Jawa," pungkasnya. (AMH)

## **Laporan dari Paris:** **Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri** **Konferensi Internasional Reformasi** **Subsidi Energi Fosil**

*Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (paling kiri) menyampaikan sambutan pada pembukaan International Conference on Fossil Fuel Subsidy Reform di Paris, Perancis, Kamis (13/10)*



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, pada Kamis (13/10) menghadiri *International Conference on Fossil Fuel Subsidy Reform* di Paris, Perancis. Acara yang diselenggarakan oleh *International Energy Agency* (IEA) bekerjasama dengan Pemerintah Denmark ini dihadiri oleh perwakilan dari banyak negara, termasuk di antaranya adalah Indonesia, Meksiko, Malaysia, Jepang, Maroko, New Zealand, Inggris, Swiss, Amerika, Argentina, Brazil, Chile, China, Ethiopia, Denmark, Turki, dan Jerman. Hadir pula perwakilan dari organisasi dunia, antara lain *World Bank*, IMF, IISD/GSI, IADB, ASEAN, IPEEC, OECD, *Oil Change International*, OLADE, dan GIZ.

Dalam sambutan pembukaan acara ini, Jarman menyampaikan bahwa saat ini seluruh negara di dunia bergerak mewujudkan pembangunan energi berkelanjutan.

"Pertumbuhan konsumsi energi dan upaya penyediaan akses listrik menjadi tantangan pada banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan strategi untuk mengelola konsumsi energi dan menjaga harga yang terjangkau untuk generasi mendatang," papar Jarman. Menurutnya ketidakseimbangan konsumsi energi dan harga energi menyebabkan ketimpangan sosial pada masyarakat yang berujung pada munculnya kemiskinan, borosnya konsumsi energi, maupun kerusakan lingkungan.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol, yang membuka

konferensi, menyampaikan bahwa pengalaman Indonesia dan Meksiko dalam upaya mereformasi subsidi bahan bakar minyak maupun subsidi listrik menjadi masukan yang sangat berharga dalam studi yang disusun oleh IEA. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Meksiko menjadi tambahan negara-negara anggota IEA yang saat ini telah berjumlah 29 negara.

Fatih menjelaskan bahwa terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan reformasi subsidi energi fosil, antara lain: meningkatkan efisiensi konsumsi listrik, mengurangi emisi karbon, dan mengurangi polusi udara dari transportasi. Ia juga menyampaikan bahwa subsidi energi lebih tepat dialihkan untuk masyarakat miskin dengan membangun infrastruktur seperti sekolah, jembatan, jalan, rumah sakit, dan lainnya. "Hal ini lebih dapat dirasakan oleh masyarakat", jelas Fatih.

Jarman berharap melalui diskusi tingkat tinggi dalam forum ini, khususnya dengan berbagi pengalaman dalam melakukan reformasi subsidi energi fosil, semua pihak dapat bersama-sama menyusun strategi terbaik dalam pengelolaan konsumsi energi dengan harga yang terjangkau.

"Banyak tantangan dalam menuju pembangunan berkelanjutan, oleh karenanya perlu kebersamaan dengan niat baik yang sama" urai Jarman. (DFS)

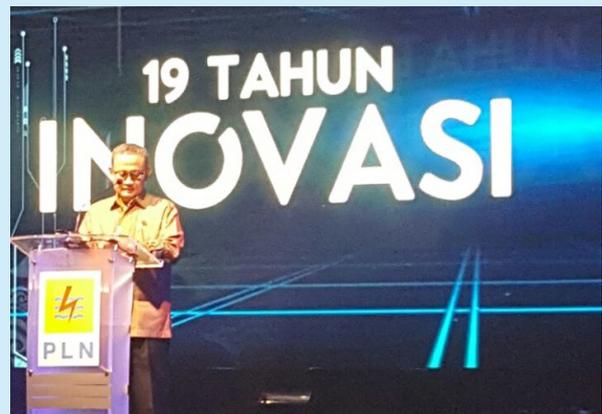
# Melalui Inovasi, PT PLN Dituntut Berikan Layanan Maksimal

PT PLN (Persero) sebagai badan usaha penyediaan tenaga listrik dituntut memberikan pelayanan maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) saat ini telah mencanangkan visi "Diakui Sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh Kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi Insani". Dengan visi tersebut serta melalui berbagai inovasi yang telah diluncurkan, PT PLN (Persero) diharap terus menyediakan pelayanan yang bermutu untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Agoes saat membuka *Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) PLN 2016*, sekaligus *launching* buku "19 Tahun Inovasi Ketenagalistrikan Indonesia". Acara ini dilaksanakan oleh PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan ketenagalistrikan di kantor Pusat PT PLN (Persero), Rabu (19/10). Selain pameran, acara yang dilaksanakan hingga Jumat (21/10) ini menghadirkan *knowledge sharing* dan diskusi yang diisi oleh Ditjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti serta beberapa perusahaan swasta yang mampu mengembangkan inovasi, diantaranya PT Gojek Indonesia dan WIR Group.

Agoes dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero), PLN wajib mengumumkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat-tempat yang mudah diketahui konsumen. "TMP ini ditetapkan oleh Pemerintah setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PLN," ujar Agoes.

Agoes mengatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, ide-ide dan pemikiran baru sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)



*Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono membuka Learning, Innovation, Knowledge & Exhibition (LIKE) PLN 2016*

maupun yang telah dijabarkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Untuk mewujudkan pembangunan 35.000 MW dan mengejar target rasio elektrifikasi 97% di tahun 2019, tentu *sharing* pengetahuan dan inovasi-inovasi dibutuhkan agar proyek-proyek yang dibangun dapat selesai tepat waktu dan masyarakat dapat menikmati hasilnya," ujar Agoes.

Pemerintah juga mengapresiasi terbitnya buku "19 Tahun Inovasi Ketenagalistrikan Indonesia". Agoes berharap agar buku ini dapat memberikan gambaran bagaimana kemajuan bidang ketenagalistrikan dapat terwujud dengan munculnya ide-ide yang selama ini tidak terpikirkan.

"Kami berharap terbitnya buku ini dapat menjadi penyemangat kita semua dalam bekerja mewujudkan ketenagalistrikan yang lebih baik," tutup Agoes. (PSJ)

# Ignasius Jonan Tegaskan Perubahan Harus Dimulai dari Diri Sendiri



Menteri ESDM Ignasius Jonan menjadi pembicara dalam One Hour University di BPSDM Kementerian ESDM, pada Kamis (10/11).

"Perubahan mulainya dari sendiri. Jadi kalau karena arahan atasan harus berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah, itu akan sulit. *Reform has to come from ourselves,*" ujar Ignasius Jonan, mengawali sesi *One Hour University* di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamis (10/11). *One Hour University* yang diadakan untuk kali keenam ini menghadirkan Ignasius Jonan sebagai pembicara.

Kepala BPSDM Djadjang Sukarna menyampaikan bahwa Jonan diundang untuk berbagi pengalaman mengenai perubahan dan inovasi yang dia lakukan saat menjabat sebagai Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI). Jonan menceritakan strateginya untuk mengurangi kecelakaan kereta api saat itu.

"Kalau kecelakaan (kereta api) kenapa terjadinya Sabtu dan Minggu? Itu karena Sabtu dan Minggu semua pimpinan libur sementara kereta terus jalan, frekuensinya semakin sering.

Saya ubah pelan-pelan," ungkap Jonan. Dia mengatur cara supaya pimpinan bergantian piket di kedua hari tersebut.

"Banyak protes awalnya," Jonan mengatakan, "tapi (strategi) itu mengurangi kecelakaan sampai 70%."

Jonan kemudian mengutip kata-kata Bill Gates yang menyatakan bahwa *invention* (perubahan besar) itu bukan karena *knowledge* (pengetahuan), tapi karena dua hal, yakni *passion* (gairah/semangat) dan *persistence* (kegigihan).

Tak hanya tentang perubahan dan inovasi, Jonan yang dilantik menjadi Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016 yang lalu pun membagikan pemikirannya mengenai *leadership* atau kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin harus bisa memberikan contoh.

"Kalau menyuruh orang, kita harus bisa melakukan sendiri. Jangan menyuruh kalau kita sendiri tidak mau," tegas Jonan

## Warta Kita

*Dalam sesi tanya-jawab, Ahmad Amiruddin dari Ditjen Ketenagalistrikan menanyakan cara supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan.*



Jonan mencermati orang-orang yang saat menduduki kursi pemimpin menjadi malas terjun ke lapangan dan hanya menjadi *pen pusher*, yakni orang yang hanya bisa tanda-tangan.

"Kalau begini, tidak bisa diubah. *Nobody can change the reality unless we live the reality*," Jonan menyampaikan.

Saat sesi tanya jawab, Ahmad Amiruddin dari Ditjen Ketenagalistrikan menanyakan cara supaya cepat beradaptasi

dengan lingkungan agar cepat belajar.

Jonan menjawab, "Saya pasti belajar dulu. Orang jadi pemimpin itu tidak penting dia menjadi hebat, yang penting adalah bisa mengubah ke arah yang lebih baik. Dia lihat dulu, kalau sudah baik, jangan diubah-ubah. Kalau kurang baik, kita hitung (evaluasi) dan sebagainya. Jangan terus maunya sendiri, biar terkenal."

Dalam sesi yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini, Jonan menampilkan beberapa kutipan inspiratif dari orang terkenal seperti Haruki Murakami dan Mother Teresa yang dianggap relevan dengan materi tentang inovasi dan kepemimpinan yang disampaikan. Salah satu perkataan Mother Teresa yang Jonan kutip berbunyi, "*Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.*" Jonan kemudian menegaskan kembali, "Kalau tidak bisa melakukan kesempatan dalam hal besar, paling tidak kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan sungguh-sungguh."

*One Hour University* merupakan sesi berbagi pengalaman yang diinisiasi oleh BPSDM sejak tahun lalu. Dalam acara ini diundang para tokoh yang telah melakukan inovasi atau perubahan yang bermakna dengan tujuan memotivasi dan menginspirasi serta menambah wawasan kalangan internal Kementerian ESDM. Dalam acara kali ini turut hadir Dirjen Ketenagalistrikan Jarman dan Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono, serta pejabat dan pegawai Kementerian ESDM. (AMH)



*One Hour University* merupakan sesi berbagi pengalaman yang diinisiasi oleh BPSDM sejak tahun lalu untuk menginspirasi pegawai Kementerian ESDM.

# Pembangkit Listrik Harus Mengedepankan Teknologi Ramah Lingkungan

Pembangkit listrik di Indonesia harus berwawasan lingkungan dengan mengurangi emisi sebagai tuntutan global. Setiap pembangkit listrik harus mengembangkan komersial teknologi yang ramah lingkungan dan efisien. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengungkapkan bahwa pembangkit listrik harus memberikan perhatian kepada lingkungan hidup, khususnya terkait sumbangan emisi gas rumah kaca. Teknologi pembangkit listrik disebutnya harus bersih untuk mengurangi pemanasan global.

Hal tersebut disampaikan Jarman saat membuka PJB Connect 35.000 MW OP.EXC, *Conference & Exhibition of Technology to Support 35.000 MW Operational Excellence*, Senin (24/10). Pameran yang diselenggarakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) ini bertujuan menjalin dan memperkuat hubungan dalam bidang *Operation Maintenance Engineering* (OME) pembangkit. Pameran sendiri berlangsung hingga Selasa (25/10) di kantor PT PJB Surabaya.

Jarman dalam sambutan tersebut juga menyampaikan bahwa konsumsi listrik Indonesia terus naik meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

"Begitu juga konsumsi listrik per-kapita, walaupun konsumsi listrik per-kapita Indonesia meningkat setiap tahun namun masih rendah, yaitu 910 kWh di tahun 2015," ungkap Jarman. Konsumsi listrik per-kapita tersebut disebutnya masih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus naik, maka kebutuhan teknologi pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan merupakan keharusan. Jarman mengapresiasi acara yang dijalankan oleh PT PJB ini. Menurutnya acara ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk *sharing knowledge* tentang teknologi terkini di bidang pembangkitan.



*Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan acara PJB Connect di Surabaya. Ia menegaskan pentingnya pembangkit listrik untuk berwawasan lingkungan.*

"Pembangunan pembangkit listrik tidak lepas dari masalah teknologi yang terus berkembang. Ini pula yang menjadikan forum PJB Connect 35.000 OP.EXC menjadi sangat strategis" ujar Jarman.

Dirjen Ketenagalistrikan mengingatkan PT PJB untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam hal pemanfaatan teknologi bersih yang ramah lingkungan dan melakukan kontrol atau monitoring terhadap pembangkit-pembangkit yang dimiliki. *Commercial Clean Technology* untuk pembangkit-pembangkit listrik disebut Jarman sebagai tuntutan mengoperasikan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Jarman sendiri mengapresiasi PJB yang sudah memiliki *control room* yang dapat memonitor pembangkit di seluruh Indonesia secara real time. Inovasi-inovasi seperti ini diharapkan terus dapat ditingkatkan untuk memberkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (PSJ)

# Filosofi Baru Penyediaan Energi Listrik



Sesditjen Ketenagalistrikan Agoes Triboesono menyampaikan materi dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Jakarta (8/9).

Filosofi penyediaan energi listrik di Indonesia mengalami perubahan dengan dicanangkannya Program 35.000 MW. Kalau sebelumnya, pemerintah memenuhi listrik dari berapa kebutuhan (*demand*) yang ada, saat ini pemerintah menyediakan infrastruktur listriknya, lalu investor dipersilakan untuk datang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agoes Triboesono saat membawakan presentasi dalam Forum Ketahanan Energi Nasional di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Agoes perubahan filosofis tersebut dikarenakan banyaknya permintaan dari para investor terkait ketersediaan listrik jika ingin mengembangkan usaha di Indonesia. "Jadi kita menyediakan infrastrukturnya karena banyak investor-investor baru selalu bertanya mana listriknya, saya dapat listrik dari mana," ungkap Agoes.

Dulu karena infrastruktur listrik belum tersedia, mereka memasang pembangkit sendiri. "Nah itu membuat investasi mereka jadi lebih mahal. Kalau lebih mahal, produksinya juga jadi lebih mahal, karena produksinya mahal jadi tidak bisa bersaing di dunia global," ungkap Agoes. Jika Program 35.000 MW berjalan dengan baik, Agoes mengungkapkan bahwa investor akan datang dengan segala infrastruktur yang telah tersedia.

Agoes Triboesono juga menyampaikan optimisme pemerintah dalam pembangunan 35.000 MW. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempersingkat proses perizinan dan menyelesaikan beberapa kendala. Agoes juga menyebutkan bahwa tambahan 7.000 MW dari total 42.000 MW akan selesai sekitar tahun 2017.

"Yang tujuh ribu ini bukan 2019 operasinya, kita harapkan sekitar 2017 paling lambat itu sudah masuk semua," jelasnya. Selain membangun pembangkit listrik, Program 35.000 MW juga fokus pada pembangunan jaringan transmisi listrik. "Jaringan Transmisi kita targetkan kita akan membangun tambahan sekitar 46.630 kms" ungkap Agoes.

Dalam penyediaan listrik kepada masyarakat, pemerintah memiliki filosofi penyediaan listrik yang lebih sederhana dan cepat. Menurut Agoes, tolok ukur keberhasilannya ada pada peringkat Indonesia dalam survey *World Bank* terkait *getting electricity*. Ia menyebutkan bahwa dulu untuk mendapatkan listrik ada tujuh prosedur yang harus dilalui, sedangkan sejak tahun 2015 telah dikurangi menjadi lima prosedur.

"Waktunya juga atau kecepatannya tahun 2012 itu 108 hari sekarang waktunya tinggal 79 hari," ungkap Agoes. Di tahun 2012 hasil survey *World Bank* menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 161 *getting electricity*. "Di 2016 alhamdulillah sudah membaik diperingkat 46. Target kita di 2017 nanti mudah-mudahan bisa masuk 20 besar," kata Agoes.

Selain filosofi dari penyediaan infrastruktur energi, pemerintah juga merubah paradigma masyarakat soal subsidi energi. Menurut Agoes, pemerintah masih memberikan subsidi kepada pelanggan listrik yang dianggap tidak mampu. Di 2017 menurut Agoes, pemerintah akan mengajukan subsidi untuk pelanggan yang tidak mampu sekitar 48,56 triliun dengan catatan bahwa nanti pelanggan 900VA akan dipisahkan menjadi pelanggan yang benar-benar tidak mampu untuk diberi subsidi dengan pelanggan yang benar-benar mampu yang tidak perlu disubsidi lagi. (MH/PSJ)



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kelima dari kanan) dan rombongan berfoto bersama dengan beberapa pejabat dan pegawai Proyek PLTP Sarulla, Sumatera Utara, Sabtu (12/11).

# Dirjen Ketenagalistrikan Pantau Kesiapan Evakuasi Daya PLTP Sarulla

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman pada Sabtu (12/11) meninjau Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Proyek PLTP Sarulla terdiri atas dua lokasi yaitu *SIL Power Plant* yang terletak di Silangkitang (110 MW), serta *NIL Power Plant* yang terletak di Namora Langit (2 x 110 MW).

Kunjungan kerja ini fokus pada *SIL Power Plant* yang dijadwalkan akan *Commercial of Date (COD)* atau beroperasi pada November 2016. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jarman didampingi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul, Kepala Subdit Kerjasama Ketenagalistrikan Benhur Tobing, serta Kepala Seksi Evaluasi Investasi Trinaldy Konnery.

Sebelum menuju PLTP Sarulla di Silangkitang, Dirjen bersama rombongan terlebih dahulu meninjau Gardu Induk Sarulla 275/150 kV. Manager UPK yang membawahi Sarulla, Ranton Bintang menjelaskan bahwa GI Sarulla 275/150 kV dipersiapkan untuk membantu mengevakuasi daya yang dihasilkan dari *NIL Power Plant* (2x110 MW), sedangkan untuk mengevakuasi daya dari *SIL Power Plant* akan menggunakan jaringan 150 kV *existing* dengan melakukan penambahan sambungan (T-Line) ke Gardu Induk yang berada di lokasi *SIL Power Plant*.

Pada diskusi yang dilaksanakan di kantor *SIL Power Plant*, *Site Construction Manager* Sarulla Rodel M. Briones menjelaskan bahwa untuk PLTP Sarulla ini menggunakan teknologi *Binary Cycle Power Plants (BCPP)*, yang merupakan teknologi

## Warta Kita

pertama yang diterapkan di Indonesia. Pada teknologi BCPP ini akan dilakukan *reinject fluida geothermal* 100%, menggunakan *system air-cooling* dan *multiple modular units*.

Briones juga menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat untuk pelaksanaan pembangunan PLTP Sarulla ini sebanyak 3.399 orang dengan komposisi 42,39% tenaga kerja lokal setempat (Tapanuli Utara), 53,37% dari luar Tapanuli Utara dan 4,24% tenaga kerja asing.

Pada hari yang sama, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman juga melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Sicanang. Kedatangan Dirjen Ketenagalistrikan dan rombongan disambut oleh Manager sektor Pembangkitan Belawan Leonardus Sitinjak. Leonardus menginformasikan proses regasifikasi gas Arbel (Arun Belawan), dimana regasifikasi yang dilakukan oleh Perta Arun Gas (PAG) dan selanjutnya diangkut melalui pipa sepanjang sekitar 340 km dari Arun ke Belawan oleh Pertagas. Sesuai penjelasannya, Gas Arbel ini mulai mengalir sejak tanggal 14 Maret 2015. Dijelaskan juga bahwa rata-rata nominasi/pemakaian PLN sektor Belawan harian sekitar 95 MMSCFD.

Di malam hari, Dirjen beserta rombongan menyempatkan

mengunjungi Unit Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara yang berada di Jl. Yos Sudarso-Medan. Pada saat memasuki ruang pengaturan, terlihat beban grafik beban untuk Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebesar 1.813 MW sedangkan beban terlayani sebesar 1.719 MW dan Daya Mampu Pembangkit sebesar 1.649 MW (status tanggal 12 Nopember 2016 pukul 19.00 WIB).

Untuk memperkuat sistem Sumbagut ini di malam hari, dilakukan transfer daya dari Inalum sebesar 49 MW dan transfer daya dari Sumut ke Aceh sebesar 86 MW. Dalam diskusi bersama petugas UPB, disampaikan bahwa dengan adanya rencana tambahan daya dari PLTP Sarulla, diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara (TK/PSJ).



Proyek PLTP Sarulla terdiri atas dua lokasi yaitu SIL Power Plant yang terletak di Silangkitang (110 MW), serta NIL Power Plant yang terletak di Namora Langit (2 x 110 MW).

# Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Penandatanganan Kontrak Pembangunan PLTU Bengkulu

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, Kamis (27/10) petang menghadiri penandatanganan *Facility Arrangement on Financial Closing* antara PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) dengan *the Industrial and Commercial Bank of China* (ICBC) dan *the Export Import Bank of China* (CEXIM). Dalam waktu yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Kontrak EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) antara PT TLB dengan *the Sinohydro Corporation Limited*. Acara penandatanganan ini digelar di The Dharmawangsa, Jakarta.

Dalam sambutan pembukaan, Presiden Komisaris PT TLB Petrus Halim menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan yang dilangsungkan di tengah cuaca hujan yang sedang terjadi merupakan pertanda baik bagi masyarakat Tiongkok. Petrus mengharapkan kerjasama ini dapat bermanfaat bagi semua pihak antara masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan investor. Petrus menggarisbawahi bahwa peningkatan akses tenaga listrik bagi masyarakat akan berdampak bagi pengentasan kemiskinan dan mengembangkan ekonomi lokal. "*Wise man say, start doing everything by the final design on your mind*", tukasnya di akhir sambutan.

Selanjutnya *Chairman of Power China Resources*, Sheng Yuming, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan fasilitasi Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah sehingga proyek ini memasuki tahapan penting dalam realisasi konstruksi. Sheng mengharapkan dalam tiga tahun, PLTU Bengkulu dapat beroperasi komersial.

Direktur PLN Regional Sumatera, Amir Rosidin, awalnya pesimistis proyek akan berjalan karena delapan bulan tidak ada aktivitas sesuai penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA), namun Amir terkejut sekaligus senang karena dalam satu bulan setelahnya kegiatan tindak lanjut PPA dapat dilaksanakan. Amir mengapresiasi dukungan

penuh Gubernur Provinsi Bengkulu yang menunjukkan kepemimpinan dalam mewujudkan terwujudnya proyek.

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah Bengkulu diantaranya adalah mempercepat penuntasan ijin AMDAL, akuisisi lahan dan hal-hal terkait lainnya. "Arahan Presiden Joko Widodo untuk penuntasan proyek pada tahun 2019 meskipun sesuai kontrak baru bisa beroperasi tahun 2020", papar Amir. Ia juga mengutip pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Archandra Tahar bahwa penalti yang akan dikenakan atas wanprestasi waktu dan kualitas akan sangat besar, sehingga proyek harus terbangun sebagaimana direncanakan.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan apresiasi kepada TLB yang berhasil melangkah masuk ke tahapan yang biasanya sulit bagi pengembang, yaitu *Financial Closing*, karena tahap inilah penentuan lanjut atau berhentinya suatu proyek infrastruktur, dan banyak pengembang gagal di tahapan ini.

Jarman mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya berarti peningkatan kapasitas, namun lebih dilihat sebagai pemerataan akses tenaga listrik dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan mendukung kestabilan sistem tenaga listrik di Sumatera. "Peran Pemerintah Provinsi Bengkulu khususnya Gubernur Bengkulu sangat mempengaruhi dan mempercepat proses persiapan hingga di tahapan ini," ungkap Jarman.

Menutup sambutannya, Jarman mengacu pada laporan Bank Dunia atas peningkatan signifikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. "Pemerintah Indonesia terus berusaha memperbaiki peraturan dan kebijakan. Masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan agar iklim investasi dapat meningkat," tutupnya.

## Warta Kita



*Dirjen Ketenagalistrikan jarman (kedua dari kanan) menyaksikan Facility Arrangement on Financial Closing antara PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) dengan the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dan the Export Import Bank of China (CEXIM).*

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam sambutannya mengingat sulitnya bisnis tenaga listrik 25 tahun lalu. Saat terpilih sebagai Gubernur Bengkulu, Ridwan berkomitmen tidak akan terjadi kesulitan dan hambatan dalam berbisnis di Bengkulu, khususnya pengembangan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menemui pengembang TLB yang baru saja menandatangani PPA dan menanyakan hambatan yang dihadapi dan dikhawatirkan oleh TLB. Preskom TLB selanjutnya memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi, diantaranya akuisisi lahan, AMDAL, dan perijinan. Ridwan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur menjelaskan bahwa ia telah mengambil peran aktif menyelesaikan hambatan yang dihadapi TLB.

Ridwan membagi pengalaman mengubah Pergub tahun 1985 tentang ganti rugi dan diselesaikan dalam kurun waktu 1x24 jam, yaitu dengan membandingkan Pergub semua provinsi tetangga Bengkulu. Ia lalu membuat matriks perbandingan dan mengambil contoh Pergub yang paling konservatif sehingga Pergub Bengkulu tersebut bisa selesai. "Saya akan mengawal proyek ini sampai terwujud di tahun 2019", ujarnya berkomitmen. (RBS)

# Dirjen Ketenagalistrikan Kunjungi PLTU Tenayan dan PD Buah Sekata di Riau

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, Minggu (20/11) meninjau proyek PLTU Tenayan (2x110MW) di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada rombongan Ditjen Ketenagalistrikan, progres penyelesaian PLTU sudah mencapai 95% per akhir Oktober 2016. PLTU Unit 1 ini telah memasuki tahap komisioning dan tengah menjalani pengujian *reliability run*. Diharapkan unit 1 ini dapat lolos uji kelaikan dan memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) paling lambat 9 Desember 2016.

PLTU Tenayan Unit 1 ini ditargetkan sudah dapat beroperasi secara komersial (COD) pada Januari 2016, sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan listrik pada sistem Sumatera Bagian Utara, khususnya daerah Riau. Sedangkan untuk PLTU Unit 2 ditargetkan dapat menyusul segera COD pada Maret 2017.

Dengan beroperasinya PLTU Tenayan ini, diharapkan sistem kelistrikan Riau akan semakin kuat dalam melayani beban yang terus tumbuh. Mengingat pentingnya tambahan pasokan listrik untuk mengatasi defisit pada sistem kelistrikan Riau, maka dalam kunjungannya, Jarman mendorong PLN agar terus mengawal proses penyelesaian PLTU Tenayan ini.

Usai meninjau PLTU Tenayan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Perusahaan Daerah (PD) Buah Sekata di Pelalawan, Riau. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dengan PD Buah Sekata terkait wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang dikelolanya.

PD Buah Sekata memiliki penetapan wilayah usaha seluas 75.000 hektar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui surat Keputusan Nomor

11/1/PWUPTL/2016. Dalam mengusahakan penyediaan listrik bagi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, PD Buah Sekata membeli energi listrik dari PLTU milik PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan kapasitas sebesar 4,7 MW.

PD Buah Sekata ini pada dasarnya muncul sebagai respon dari keterbatasan PLN melayani pasokan listrik bagi masyarakat di Pelalawan. Pada tahun 2004, ketika mulai beroperasi, PD Buah Sekata hanya memiliki 216 pelanggan. Namun seiring perkembangan waktu, jumlah pelanggan terus bertambah hingga mencapai sekitar 6.642 pelanggan per November 2016. Pelanggan BUMD ini terdiri dari pelanggan rumah tangga, bisnis, maupun kantor Pemerintah. Tarif tenaga listrik yang diterapkan mengikuti tarif yang digunakan PT PLN (Persero).

Jarman menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah mencanangkan program percepatan elektrifikasi untuk daerah terpencil, daerah perbatasan yang belum disentuh oleh PLN. "Pemerintah sedang menggodok regulasi untuk mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi, dengan cara membagi daerah yang saat ini belum berlistrik seperti menjadi beberapa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil seperti PD Buah Sekata," kata Jarman.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini susut jaringan (*losses*) PD Buah Sekata mencapai 20% yang didominasi oleh susut nonteknis berupa pemakaian listrik ilegal. Untuk itu, Jarman menyampaikan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan melalui instrumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat membantu PD Buah Sekata dalam upaya menurunkan susut nonteknis. "Jika menginginkan bantuan PPNS, PD

## Warta Kita



*Rombongan Ditjen Ketenagalistrikan meninjau proyek PLTU Tenayan (2x110 MW) di Pekanbaru, Riau. Proyek ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada Januari 2016.*

Tuah Sekata dapat menyurati Ditjen Ketenagalistrikan," ungkapnya.

Bupati Pelalawan, Harris, yang turut hadir dalam diskusi menyampaikan bahwa sebelum hadirnya PD Buah Sekata, rasio elektrifikasi di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya hanya sebesar 21,7% (2001) telah berhasil diakselerasi hingga mencapai 74,2%. Mengingat kemampuan PD Buah Sekata yang masih terbatas, masih ada daftar tunggu sekitar 10.600 pelanggan yang belum terlayani. PD Buah Sekata berencana untuk membeli pasokan listrik dari PLTMG Langgam Power, namun saat ini terkendala pembangunan jaringan yang menghubungkan sistem PD Buah Sekata dengan PLTMG Langgam Power.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Alihuddin Sitompul, yang turut hadir menyampaikan agar PD Buah Sekata juga dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam upaya melistriki desa yang belum berlistrik di daerah wilayah usaha PD Buah Sekata.

Selain mengunjungi PLTU Tenayan dan PD Buah Sekata, rombongan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga menyempatkan untuk meninjau PLTMG Langgam Power dan PLN P3B Sumatera. (DFS)

## Tips

# Menghindari *Mengantuk* Setelah Jam Makan Siang

Perasaan mengantuk setelah menyantap makan siang tentunya menjadi hal yang sering dihadapi oleh pekerja kantoran. Terlebih apabila setelah makan siang, Anda kembali berada dalam ruangan rapat yang dingin dan relatif sepi. Menguap berkali-kali membuat Anda dan orang lain di sekitar menjadi kurang fokus terhadap apa yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Mengantuk setelah makan siang sangatlah wajar, setelah makan tubuh kita menghasilkan berbagai jenis enzim untuk menghancurkan bahan makanan. Kemudian proses ini akan membuat kadar gula dalam darah meningkat drastis. Akibatnya pankreas

akan melepaskan insulin ke darah secara langsung. Insulin inilah yang akan meningkatkan kadar melatonin dan serotonin dalam otak dan kemudian memicu rasa mengantuk.

Untuk menghindari rasa mengantuk setelah makan siang, cobalah mulai hari Anda dengan sarapan sebelum berangkat kerja. Sarapan sangat penting karena bisa menjadi sumber energi yang cukup hingga waktu makan siang hari. Jumlah makanan yang dimakan saat makan pagi harus dalam jumlah yang cukup.

Sejumlah makanan yang disarankan untuk dimakan di pagi hari adalah roti gandum, sereal, yogurt, susu rendah

lemak, ubi, dan buah-buahan. Hindari makan berat dengan karbohidrat tinggi seperti nasi beras putih lengkap dengan lauk pauk di pagi hari.

Bawalah bekal cemilan sehat seperti buah-buahan atau biskuit gandum untuk mengisi perut Anda ketika merasa lapar sebelum jam makan tiba. Apabila di kantor Anda tersedia kulkas, manfaatkanlah hal tersebut dengan menyimpan makanan sehat seperti buah-buahan, yogurt, jus buah, susu rendah lemak dan makanan sehat lainnya. Dengan memiliki stok cemilan sehat, Anda bisa mengganjal perut saat lapar dan lebih fokus menyelesaikan pekerjaan di kantor.



*Mengantuk setelah makan siang sangatlah wajar karena meningkatnya kadar gula dalam darah.*

## Tips



*Stok cemilan sehat seperti buah-buahan bisa untuk mengganjal perut saat lapar sehingga lebih fokus menyelesaikan pekerjaan di kantor.*

*Menyentuh air dingin dari keran air di kamar mandi dapat membuat badan merasa segar.*



Sekitar satu atau dua jam sebelum waktu makan siang, cobalah makan buah-buahan. Dalam keadaan perut setengah kosong, buah akan menjadi detoks yang efektif untuk tubuh dan semua nutrisi yang dikandung buah dapat terserap dengan maksimal. Selain itu buah meningkatkan kadar gula dalam darah secara perlahan sehingga perut terasa kenyang lebih lama. Sehingga pada saat makan siang, porsi makanan Anda tidak berlebihan.

Hindari makan siang dengan kadar karbohidrat dan gula yang tinggi, makanan seperti ini memang memberi suplai tenaga. Namun, makanan jenis ini sekaligus akan membuat mudah mengantuk setelahnya. Sebaiknya, konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, tinggi protein, dan lemak sehat. Selain memberi pasokan energi,

makanan jenis ini akan menjaga tubuh tetap bugar dengan mengontrol kadar glukosa dalam darah.

Pada saat makan siang sebaiknya Anda tidak mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Makanan yang porsinya terlalu besar hanya akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih berat, bahkan produksi insulin juga bisa terhambat sementara kebutuhan insulin untuk memecah gula menjadi sangat tinggi.

Jika hal ini terjadi maka produksi serotonin dalam otak meningkat sementara oksigen dalam tubuh tidak tercukupi. Hal ini yang akan membuat tubuh Anda menjadi lebih mengantuk. Makanlah dalam porsi secukupnya, kurangi karbohidrat dan perbanyaklah porsi sayur.

Jika Anda sudah terlanjur mengantuk pada saat jam kantor, sebaiknya segera beranjak untuk sekadar bergerak atau berjalan-jalan di sekitar ruangan. Anda bisa pergi ke halaman belakang kantor demi mendapat udara luar dan sinar matahari. Anda juga bisa menyentuh air dingin dari keran air di kamar mandi yang akan membuat Anda merasa segar. Lakukan juga pergerakan-pergerakan kecil seperti stretching dan lompatan kecil agar badan anda terasa lebih rileks.

Mengantuk setelah jam makan siang memang tetap sering dialami oleh kebanyakan orang. Untuk mengurangi hal tersebut, cobalah terapkan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya agar produktivitas Anda di kantor tetap terjaga dari pagi hingga sore hari. (UH)

# Daftar Legislasi dan Regulasi Koleksi Perpustakaan DJK

Bulan Januari – Desember 2016

oleh: Dina Andriani, S.Hum. (Pustakawan Muda)

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK
1.	Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
2.	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar
3.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN
4.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Asesor Ketenagalistrikan
5.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
6.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
7.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu-bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
8.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
9.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
10.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Kalimantan
11.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
12.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
13.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang
14.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
15.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga
16.	Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Teknis terhadap Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang dikuasai Masyarakat pada Kawasan Hutan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
17.	Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016 s.d. 2025
18.	Keputusan Menteri ESDM Nomor 7424 K/30/MEM/2016 tentang Patokan Besaran Komponen Biaya Produksi untuk Perhitungan Harga Dasar Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang

# Jaga Nyala Cahaya *untuk* Generasi Masa Depan



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

# HINDARI KEBAKARAN RUMAH!



Pastikan listrik di rumah Anda  
sesuai **Sertifikat Laik Operasi**  
demi keamanan bersama



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)